

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA  
KEDIRI NOMOR 58 TAHUN 2011 TENTANG  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(SIMPPD)**

(Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  
Kota Kediri)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Skripsi  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**MOCHAMMAD REZZA FAHLAVI  
NIM. 135030607111007**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
MALANG  
2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerahm(SIMPPD) (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri)

Disusun oleh : Mochammad Rezza Fahlavi

NIM : 135030607111007

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Minat : Perencanaan Pembangunan

Malang, 10 Desember 2018

Komisi Pembimbing

Ketua



**Drs. Heru Ribawanto, MS**  
NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota



**Rendra ko Wismanu, S.AP.,M.AP.**  
NIP. 2011078512141001

\* laporan ini dibuat 2 lembar :  
1. Program Studi  
2. Mahasiswa



**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis  
Tanggal: : 20 Desember 2018  
Jam : 11.00 – 12.00  
Skripsi atas nama : Mochammad Rezza Fahlavi  
Judul : Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri)

**dan dinyatakan LULUS**

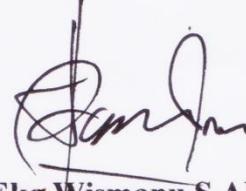
**MAJELIS PENGUJI**

Ketua



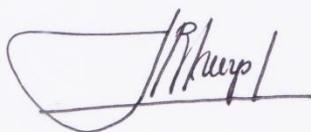
**Drs. Heru Ribawanto, MS**  
NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota



**Rendra Eko Wismanu S.AP., MAP**  
NIP. 20110785121141001

Anggota



**Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si**  
NIP. 19530807 197903 2 001

Anggota



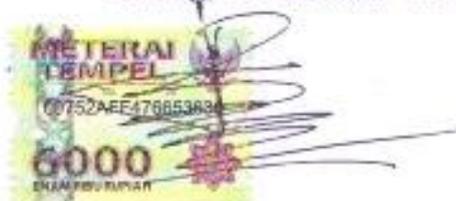
**Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19730713 200604 1 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini yang berjudul **Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri)** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsu-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 10 Desember 2018



**Mochammad Rezza Fahlavi**  
NIM. 135030607111007

## BIODATA

### DATA DIRI

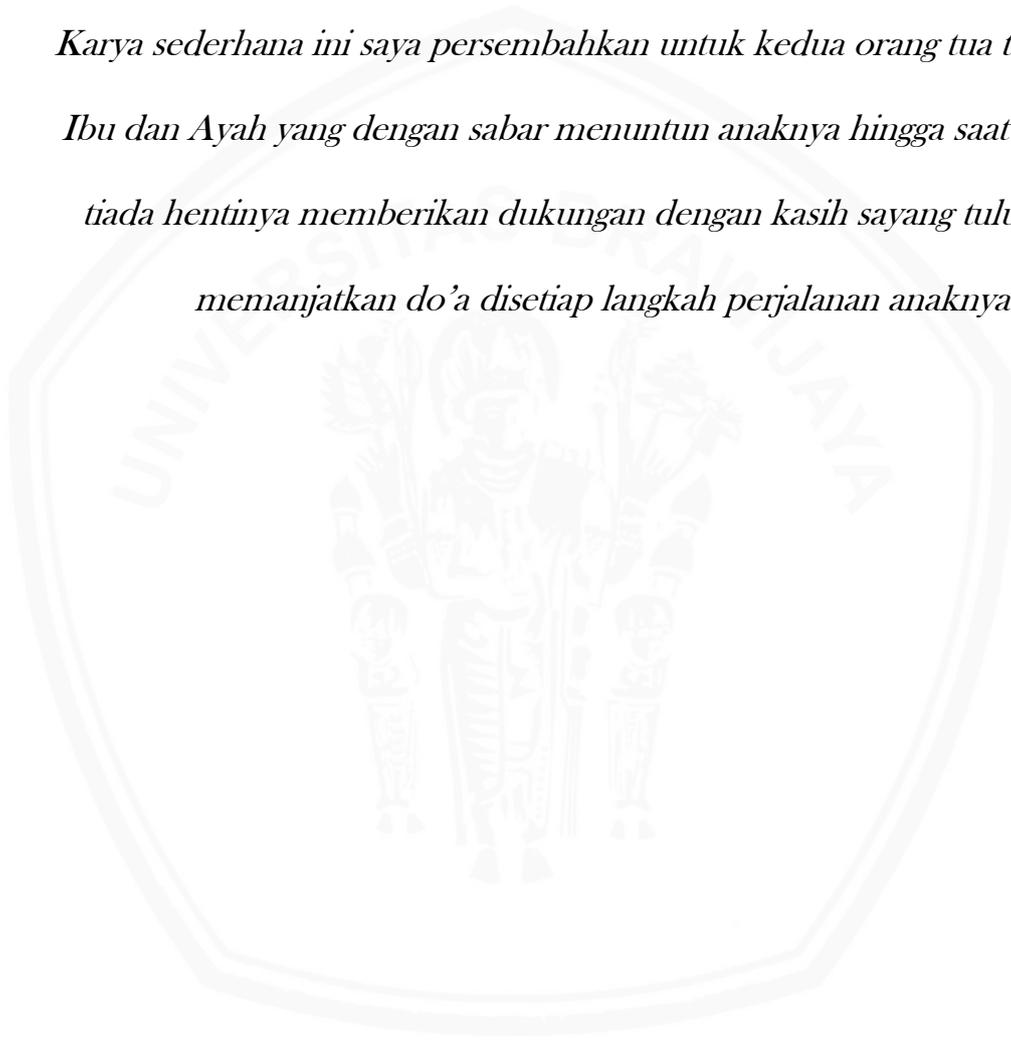
Nama : Mochammad Rezza Fahlavi  
Nomor Induk Mahasiswa : 135030607111007  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat Asal : Ds.Tegaron, RT/RW 027/003, Kec.Prambon, Kab.  
Nganjuk, Jawa Timur  
Alamat di Malang : Jalan Joyotamansari No.2, Merjosari, Malang  
E-mail : rezzafahlavi@gmail.com  
Nomor HP : 081259661704



### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MIN Nanggung Tahun 2002-2008
2. SMP Negeri 1 Kediri 2008-2011
3. SMA Negeri 1 Kediri 2011-2013
4. Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi. Jurusan Administrasi Publik. Tahun 2013-3018

*Karya sederhana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta,  
Ibu dan Ayah yang dengan sabar menuntun anaknya hingga saat ini dan  
tiada hentinya memberikan dukungan dengan kasih sayang tulus, serta  
memanjatkan do'a disetiap langkah perjalanan anaknya.....*



## RINGKASAN

Mochammad Rezza Fahlavi, 2018, **Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri)**. Minat Perencanaan Pembangunan. Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya Malang. Dosen Pembimbing: Drs. Heru Ribawanto, MS dan Rendra Eko Wismanu S.AP, M.AP

---

Penelitian ini dilakukan atas dasar meningkatnya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Kota Kediri dalam menuju upaya tata kelola pemerintahan yang baik melakukan reformasi birokrasi melalui penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) dalam usaha untuk mempermudah kinerja pegawai pemerintahan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan Kota Kediri yang akuntabel.

Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 yang ada sebagai kebijakan untuk mengatur tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) di Kota Kediri. Kebijakan tersebut tentu harus dapat diimplementasikan dengan baik dan benar kepada pihak-pihak terkait yaitu pihak kelurahan, kecamatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas dalam mengumpulkan dan menyusun data terkait kebutuhan pembangunan di Kota Kediri.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) telah diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri. Penelitian dengan menggunakan teori George C. Edward III dapat disimpulkan yaitu: a) proses komunikasi dengan sasaran kebijakan cukup baik, b) tidak ditemukan masalah dalam fasilitas, anggaran, informasi dan wewenang, c) sikap disposisi pelaksana dan sasaran kebijakan yang baik, dan d) struktur birokrasi yang cukup jelas. Akan tetapi dalam proses implementasi masih terdapat kekurangan-kekurangan, yaitu: terbatasnya sumber daya manusia, dan kurang kompetennya sumber daya manusia yang ada. Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan dengan baik perlu meningkatkan faktor pendukung yang ada serta mengatasi faktor penghambat yang muncul. Rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) dengan menambah jumlah pegawai yang bertanggung jawab dalam mengelola SIMPPD serta perlu diberikannya pelatihan dan bimbingan teknis.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD)

## SUMMARY

Mochammad Rezza Fahlavi, 2018, **Implementation of Mayor Regulation No.58 of 2011 About Regional Development Planning Management Information System (SIMPPD) (Studies in Development Planning Agency, Research, and Development of Kediri)**. Interest in Development Planning. Departmen of Public Administration. Faculty of Administrative Science. University of Brawijaya Malang. Supervisor: Mr. Drs. Heru Ribawanto, MS and Mr.Rendra Eko Wismanu S.AP, M.AP

---

This research was conducted on the basis of increasing demands for good and transparent governance. Kediri City is heading towards good governance efforts to reform the bureaucracy through the use of the application of the Regional Developmen Planning Managemen Information System (SIMPPD). Implementation of the Regional Development Planning Management Information System (SIMPPD) in an effort to simplify the performance of government employees in preparing accountable Kediri's development planning documents..

The Mayor Regulation Number 58 Year 2011 exists as a policy to regulate the implementation of the Regional Development Planning Management Information System (SIMPPD) in Kediri City. The policy must certainly be implemented properly and correctly for the relevant parties, namely the wards, district and the Regional (SKPD for collecting and compiling data related to development needs in Kediri City.

The results of the research that have been conducted show that the Regional Development Planning Management Information System (SIMPPD) policy has been implemented by the Development Planning, Research and Development Agency of Kediri. Research using the theory of George C. Edward III can be concluded, as: a) the process of communication with policy objectives is quite good, b) no problems found in facilities, budget, information and authority, c) attitude of disposition of implementers and good policy objectives, and d) bureaucratic structure that is quite clear. However, in the implementation process there are still shortcomings, as: limited human resources, and lack of competency of existing human resources. To implement a policy properly it is necessary to increase the existing supporting factors and overcome the inhibiting factors that arise. Recommendations that can be given are related to the implementation of the Regional Development Planning Management Information System (SIMPPD) policy by increasing the number of employees responsible for managing SIMPPD and providing training and technical guidance.

**Keywords: Policy Implementation, Regional Development Planning Management Information System (SIMPPD)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan masa belajarnya di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang periode X (2017-2021).
3. Bapak Drs. Heru Ribawanto MS selaku pembimbing 1 dan Bapak Rendra Eko Wismanu, S.AP, M.AP selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan serta arahnya untuk skripsi penulis dengan sabar disaat membimbing.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Publik yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan.

6. Seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik atas bantuan dan kerjasamanya dalam pemberian informasi dan data-data yang dibutuhkan terkait dengan tema skripsi yang penulis ambil.
7. Seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan atas bantuan dan kerjasamanya dalam pemberian informasi dan data-data yang dibutuhkan guna kelengkapan skripsi.
8. Seluruh narasumber yang telah membantu melancarkan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data penelitian.
9. Kedua orang tua saya, ibu Kamsiyati dan ayah Ali Muhklis atas jasa-jasanya, doa dan kesabaran dalam mendidik dan memberikan kasih sayang, serta kakak saya Elinda Eka Yuniyanti yang selalu memberikan doa, dukungan baik secara moril maupun finansial, arahan, dan juga motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Sahabat-sahabat yang rela kabur bersama di tengah keterperukan dalam penelitian ini (michelle, astrid, brigitta), teman-teman seperjuangan bandung-jakarta-malang nonstop (andre, stephanie) dan untuk kalian yang tidak bisa lebih dari sekedar teman yang tidak bisa penulis sebutkan.
11. Seluruh teman-teman FIA angkatan 2013, teman-teman Jurusan Administrasi Publik angkatan 2013, teman-teman Minat Perencanaan Pembangunan angkatan 2013 atas kebersamaannya selama ini dan bantuan yang berarti bagi penulis.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 10 Desember 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SUMMARY.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pembangunan Dalam Perspektif Administrasi Publik.....	13
1. Pengertian Administrasi Publik.....	13
2. Pengertian Administrasi Pembangunan.....	15
3. Pengertian Perencanaan.....	17
4. Pengertian Pembangunan.....	19
5. Pengertian Perencanaan Pembangunan.....	20
B. <i>Good Governance</i> .....	23
1. Pengertian <i>Good Governance</i> .....	23
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> .....	24
C. <i>Electronic Government</i> .....	29
1. Pengertian <i>Electronic Government</i> .....	29
2. Tipe-Tipe Relasi <i>Electronic Government</i> .....	32
3. Jenis-Jenis Pelayanan <i>Electronic Government</i> .....	35
4. Kebijakan dan Strategi Pengembangan <i>Electronic Government</i> .....	37
5. Indikator Pengembangan <i>Electronic Government</i> .....	38
D. Implementasi Kebijakan.....	39



1. Pengertian Implementasi.....	39
2. Pengertian Kebijakan.....	40
3. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	41
E. Sistem Informasi Manajemen .....	48
1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen .....	48
2. Karakteristik dan Fungsi Sistem Informasi Manajemen..	49
3. Sistem Informasi Manajemen Sektor Publik.....	53
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Fokus Penelitian.....	56
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	58
D. Sumber Data.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Instrumen Penelitian.....	61
G. Analisis Data.....	63
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>67</b>
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian .....	67
1. Profil Kota Kediri.....	67
2. Kondisi Geografis.....	68
3. Kondisi Demografi.....	70
4. Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri.....	71
5. Visi dan Misi Kota Kediri.....	75
B. Profil Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri.....	82
1. Visi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri.....	82
2. Misi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri.....	85
3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri.....	86
4. Struktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Kota Kediri.....	93
5. Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Kota Kediri.....	94
C. Penyajian Data.....	96
1. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) dalam Penyusunan Dokumen Pembangunan yang Akuntabel..	96
a. Aspek Komunikasi.....	102
1) Transmisi/Sosialisasi ( <i>Transmission</i> ).....	102

2) Kejelasan ( <i>Clarity</i> ).....	104
3) Konsistensi ( <i>Consistency</i> ).....	105
b. Aspek Sumber Daya.....	108
1) Sumber Daya Manusia ( <i>Staff</i> ).....	108
2) Informasi dan Wewenang ( <i>Information and Authority</i> ).....	111
3) Fasilitas ( <i>Facility</i> ).....	113
4) Anggaran ( <i>Budgetary</i> ).....	118
c. Aspek Disposisi.....	120
1) Pengetahuan Terhadap Kebijakan.....	120
2) Respon Terhadap Kebijakan.....	121
d. Struktur Birokrasi.....	122
1) Standart Operational Procedure (SOP).....	123
2) Fragmentasi.....	125
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kebijakan Sistem Informasi Manajemen.....	127
Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD).....	
a. Faktor Pendukung .....	128
b. Faktor Penghambat.....	130
D. Pembahasan.....	129
1. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) dalam Penyusunan Dokumen Pembangunan yang Akuntabel..	132
a. Aspek Komunikasi.....	133
1) Transmisi/Sosialisasi ( <i>Transmission</i> ).....	134
2) Kejelasan ( <i>Clarity</i> ).....	136
3) Konsistensi ( <i>Consistency</i> ).....	137
b. Aspek Sumber Daya.....	138
1) Sumber Daya Manusia ( <i>Staff</i> ).....	138
2) Informasi dan Wewenang ( <i>Information and Authority</i> ).....	140
3) Fasilitas ( <i>Facility</i> ).....	142
4) Anggaran ( <i>Budgetary</i> ).....	143
c. Aspek Disposisi.....	144
1) Pengetahuan Terhadap Kebijakan.....	144
2) Respon Terhadap Kebijakan.....	145
d. Struktur Birokrasi.....	146
1) <i>Standart Operational Procedure</i> (SOP).....	147
2) Fragmentasi.....	148
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD).....	149
a. Faktor Pendukung .....	150
b. Faktor Penghambat.....	155

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>157</b>
A. Kesimpulan.....	157
B. Saran.....	160
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>162</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>166</b>



## DAFTAR TABEL

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.	Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Kota Kediri.....	6
Tabel 2.	Jumlah Penduduk Kota Kediri Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Kediri Tahun 2009-2013.....	70
Tabel 3.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri Tahun 2009-2013.....	72
Tabel 4.	Potensi Sektor PDRB Kota Kediri terhadap Perekonomian Provinsi Jawa Timur dengan dan tanpa PT. Gudang Garam Tahun 2012-2013.....	74
Tabel 5.	Keterkaitan Visi dan Misi.....	78
Tabel 6.	Sumber Daya Manusia di Barenlitbang Kota Kediri.....	94
Tabel 7.	Kepegawaian Barenlitbang Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	95
Tabel 8.	Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Berdasarkan Kota/Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2010.....	99
Tabel 9.	Aplikasi Sistem Pemerintah Kota Kediri.....	100
Tabel 10.	Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	109
Tabel 11.	Tim Pelaksana Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) Kota Kediri.....	110
Tabel 12.	Jenis User/Pengguna dalam Sistem SIMPPD Kota Kediri.....	113
Tabel 13.	Daftar Sarana dan Prasarana di Barenlitbang Kota Kediri.....	115
Tabel 14.	Anggaran Perawatan dan Pengembangan SIMPPD Kota Kediri Tahun 2012-2016.....	119

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
Gambar 1.	Model Direct and Indirect Impact of Implementation George C. Edward III.....	43
Gambar 2.	Kerangka Fungsional Sistem Pemerintahan.....	54
Gambar 3.	Tahap Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif.....	64
Gambar 4.	Peta Administrasi Kota Kediri.....	69
Gambar 5.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri.....	72
Gambar 6.	Struktur Organisasi Barenlitbang Kota Kediri.....	93
Gambar 7.	Kegiatan Sosialisasi SIMPPD dan Musrenbang Tingkat Kelurahan Kota Kediri.....	104
Gambar 8.	Penerapan SIMPPD dalam Petunjuk Teknis Musrenbang Kota Kediri.....	107
Gambar 9.	Fasilitas di Barenlitbang Kota Kediri.....	114
Gambar 10.	Petunjuk Teknis Penggunaan SIMPPD Kota Kediri.....	124
Gambar 11.	Struktur Organisasi Pelaksana Kebijakan SIMPPD Kota Kediri .....	126
Gambar 12.	Hierarki Implementasi.....	148

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

*Good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan paradigma baru yang dianggap sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Konsep Good Governance ini muncul karena kurang efektifnya kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) (dalam Dwiyanto, 2005) mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan *society*. Ketiga komponen itu memiliki tata hubungan yang sama dan sederajat. Jika kesamaan derajat tersebut tidak sebanding atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasaan dari tata pemerintahan yang baik.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat dilihat dari keterlibatan dari tiga komponen utama yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pemerintah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki pemahaman dan pengalaman terhadap konsep tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, konsep *good governance* ini ditujukan untuk meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dianggap sebagai roda penggerak kembalinya penyelenggaraan pemerintahan yang hakiki. Penerapan konsep *good governance* akan memberikan birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif, serta

mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik dipilih sebagai penggerak utama dan *entry point* karena upaya mewujudkan nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik-praktik *good governance* dalam pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih nyata dan mudah.

Reformasi pelayanan publik dianggap sebagai penggerak utama juga dinilai strategis karena pelayanan publik dianggap penting oleh semua sektor dari semua unsur *good governance*. Para pihak pemerintah, masyarakat maupun swasta sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Di dalam *good governance* itu sendiri mensyaratkan delapan karakteristik umum/dasar, yaitu partisipasi, penegakan hukum, akuntabilitas, responsif, efektif dan efisien, ekuiti wawasan kedepan, daya tanggap dan transparansi.

Salah satu prinsip terpenting dari yang telah disebutkan di atas adalah prinsip transparansi. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik *good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pemerintah dituntut untuk terbuka terhadap masyarakat mengenai berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari informasi tentang kebijakan, proses dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan pemerintah, maka masyarakat memperoleh keadilan. Jadi, dengan keterbukaan informasi tersebut masyarakat dapat ikut mengawasi setiap proses penyelenggaraan

pemerintahan sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Menurut Dwiyanto (2005), transparansi tidak hanya dianggap penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat seringkali tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai berbagai hal yang terkait dengan pelayanan publik yang mereka perlukan. Transparansi harus dilakukan pada seluruh aspek manajemen pelayanan publik, meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/ pengendalian dan laporan hasil kerjanya.

Sebagaimana diketahui bahwa agenda pemerintah saat ini adalah melaksanakan reformasi birokrasi, yaitu melakukan perubahan secara mendasar dalam organisasi pemerintah, sebab birokrasi selalu menghadapi lingkungan yang berubah sehingga perlu melakukan adaptasi dan antisipasi agar dapat memberikan pelayanan terbaik. Perwujudan dari upaya pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang transparan adalah dengan diterapkannya *electronic government (e-government)*. Keterlibatan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor pemerintahan menghasilkan suatu konsep *electronic government (e-government)* yang akan memberikan dampak perubahan secara signifikan dalam pelayanan publik yang diberikan.

Menurut Indrajit (2002), *E-Government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan untuk memperbaiki mutu kualitas pelayanan. Konsep *e-government* muncul sejalan dengan keinginan pemerintah untuk mewujudkan

pemerintahan dengan berlandaskan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Dapat disimpulkan bahwa *e-government* merupakan bentuk penerapan pelayanan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi dengan pengolahan data yang cepat dan informasi yang tepat sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Dalam penerapan *e-government* terdapat berbagai jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah. Indrajit (2002) mengategorikan jenis-jenis pelayanan dalam 2 (dua) aspek : (a) Aspek Kompleksitas, yaitu menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi *E-Government* yang ingin dibangun dan diterapkan; dan (b) Aspek Manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya. Berdasarkan 2 (dua) aspek tersebut, maka jenis pelayanan *e-government* dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelas utama, yaitu :

1. Jenis pelayanan yang bertujuan untuk penyediaan informasi seperti : visi dan misi pemerintah, peraturan perundang-undangan, berbagai data kependudukan dan lain-lain.
2. Jenis pelayanan yang bersifat komunikasi interaktif dua arah seperti : konsultasi perpajakan, diskusi tentang rancangan undang-undang dan lain-lain.
3. Jenis pelayanan yang bersifat transaksi, seperti permohonan KTP, IMB, pembayaran wajib pajak dan lain-lain.

*E-Government* membuka peluang bagi pengelolaan dan pendayagunaan informasi terkait pelayanan publik secara cepat dan akurat serta mampu mengurangi tahap proses kerja aparatur yang tidak perlu. Oleh karena itu, konsep kerja penyelenggaraan pemerintahan yang cepat dan akurat seperti inilah yang diperlukan pemerintah untuk menerapkan sistem informasi manajemen.

Sistem informasi manajemen adalah salah satu bentuk penerapan dari *e-government* berupa sistem pengelolaan secara elektronik. Pemanfaatan sistem informasi manajemen pada pemerintahan bertujuan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Menurut Sutanta (2003),

Sistem Informasi Manajemen ialah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerja sama antara bagian satu dengan bagian lainnya dengan cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan (*input*) berupa data-data, kemudian mengolahnya (*processing*), dan menghasilkan keluaran (*output*) berupa informasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang berguna.

Jadi, sistem informasi manajemen bekerja dalam bentuk pengolahan data dan mengolahnya menjadi sebuah informasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

Pemerintah Kota Kediri dalam upaya menuju tata kelola *e-government* melakukan reformasi birokrasi melalui pengembangan berbagai aplikasi sistem informasi untuk membantu pelayanan publik. Reformasi birokrasi sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri sejak tahun 2010 melalui pengembangan aplikasi sistem manajemen keuangan. Pengembangan berbagai aplikasi sistem tersebut bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang

bersih dan bebas korupsi, meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri telah mengembangkan berbagai aplikasi sistem informasi mulai dari sistem perencanaan, penatausahaan keuangan sampai dengan sistem aplikasi untuk pelaksanaan pengawasan keuangan oleh inspektorat, serta aplikasi sistem untuk perijinan secara online sesuai dengan tabel 1 berikut :

**Tabel 1. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Kota Kediri**

No.	Nama Aplikasi Sistem	Tahun
1.	Pengembangan website (portal) Pemerintah Daerah	2010
2.	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)	2011
3.	Sistem Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)	2011
4.	Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD)	2013
5.	Sistem Pengadaan Barang & Jasa Secara Elektronik (SPSE)	2011

*Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Kediri Tahun 2015*

Pada umumnya aplikasi sistem informasi manajemen yang telah banyak dikembangkan, misalnya adanya Sistem Informasi Geografis (SIG) dan SIM Daerah (SIMDA) yang pengelolaannya terbagi menjadi SIMDA Keuangan , SIMDA BMD, dan lain-lain. Kemudian muncullah sistem informasi yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan. Permasalahan yang muncul dalam pengembangan sistem informasi manajemen terkait perencanaan pembangunan secara umumnya terkait data perencanaan pembangunan yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kediri membuat sistem informasi manajemen

terkait dalam bidang perencanaan pembangunan yang disebut Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) yang telah dikembangkan sejak tahun 2012 diharapkan dapat mengelola berbagai data perencanaan pembangunan secara komprehensif.

Menurut Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD), menerangkan bahwa penerapan SIMPPD yang berbasis pada teknologi informasi bermanfaat sebagai media untuk memudahkan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD dan masyarakat di Kota Kediri. SIMPPD Kota Kediri secara fungsional dilaksanakan oleh SKPD dan pemerintahan kelurahan serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri sebagai koordinator. Adapun tujuan dari SIMPPD yaitu untuk mempermudah mengumpulkan dan menyajikan informasi usulan dari SKPD dan masyarakat serta mengelola informasi perencanaan pembangunan dengan ruang lingkup dari tahapan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan hingga kota sampai tersusunnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Kebijakan Umum Panitia Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan (PPAP).

Keberhasilan Kota Kediri dalam memberikan pelayanan berbasis teknologi ini telah memperoleh penghargaan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) tahun 2017. Penghargaan tersebut diberikan karena Kota Kediri telah memenuhi 11 indikator dan dianggap cukup berhasil menjadi *smart city*. Salah satu indikator keberhasilan Kota Kediri sebagai salah satu kota yang mendapatkan penghargaan

RKCI tahun 2017 yaitu dalam kegiatan penganggaran berbasis teknologi (*e-budgeting*) dengan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah. ([www.jawapos.com/radarkediri/](http://www.jawapos.com/radarkediri/))

Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) disesuaikan dengan modul perencanaan pembangunan daerah dalam Cetak Biru (*Blueprint*) Sistem Aplikasi *E-Government* yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Berdasarkan Cetak Biru (*Blueprint*) Sistem Aplikasi *E-Government*, pelayanan yang diberikan dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan yaitu secara *Back Office* atau tidak adanya pelayanan langsung yang diberikan kepada pengguna. Kemudian layanan utama yang diberikan yaitu administrasi. Fungsi aplikasinya bersifat spesifik atau fungsinya merujuk ke peraturan daerah setempat. Objek layanan yang diberikan berorientasi *Government to Government* (G2G) yaitu layanan diberikan ke intra kelembagaan pemerintah daerah setempat. Jadi, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) Kota Kediri adalah aplikasi pelayanan administrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri (Barenlitbang) sebagai koordinator layanan yang ditujukan ke lembaga daerah atau SKPD sebagai penggunanya (*user*).

Berkaitan dengan uraian diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis tertarik untuk memaparkan sejauh mana penerapan sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah (SIMPPD) dalam membantu mengelola dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang akuntabel di Kota Kediri. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat judul “**Implementasi**

## **Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang akuntabel ?
2. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) pada pemerintah Kota Kediri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang akuntabel.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) pada pemerintah Kota Kediri.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi berbagai pihak yang berkepentingan yaitu :

1. Kontribusi Teoritis
  - a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan Ilmu Administrasi dan kebijakan publik guna menambah kajian Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam Ilmu Perencanaan Pembangunan untuk mengetahui bagaimana peranan SIMPPD dalam kontribusinya terhadap pelayanan publik.
  - b. Untuk dapat memberikan sumbangan teori dan konsep-konsep akademis yang berkaitan dengan efektifitas implementasi program SIMPPD.
2. Kontribusi Praktis
  - a. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan serta masukan dalam pelaksanaan program SIMPPD sehingga pemerintah Kota Kediri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan petunjuk dan pelaksanaan kerja agar efektif, efisien, dan ekonomis dalam mewujudkan prinsip *Good Governance*.

- b. Sebagai bekal acuan dalam upaya memadukan antara teori dan praktek untuk bahan implementasi atau perbandingan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengetahui secara garis besar yang dipaparkan dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika pembahasan secara singkat sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memberikan penjelasan dari beberapa sub-bab pendahuluan yaitu latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai alasan penulis untuk memilih penelitian ini, rumusan masalah yang berupa kajian yang dibahas, tujuan penelitian yang menjelaskan tentang hal-hal yang diteliti, manfaat penelitian sebagai bentuk pernyataan penelitian secara spesifik dan sistematika pembahasan yang merupakan uraian mengenai sub bab secara singkat. Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang penulis dalam pemilihan judul penelitian, dimana memilih Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Kediri sebagai tempat penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang kajian teori yang diperoleh dari buku, jurnal ataupun hasil penelitian terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan tema yang diangkat berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi limbah. Dan digunakan untuk nantinya dapat dijadikan landasan dan pedoman dalam penelitian dan penganalisaan data yang diperoleh penulis dari penelitian yang dilakukan. Kajian pustaka ini mencakup teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas yang terdiri dari: Teori

Implementasi Kebijakan yang merupakan *Grand Theory* dari konsentrasi pada penulisan skripsi ini.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, diantaranya meliputi jenis penelitian yaitu jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Kediri, sumber data baik primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis data.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat gambaran umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri yang didalamnya terdapat data mengenai struktur organisasi, visi dan misi, hasil data fokus penelitian, serta analisa data fokus. Selain itu, terdapat penyajian data yang sesuai dengan fokus penelitian beserta analisa data fokus tersebut dengan komparasi menurut teori maupun dilihat dari perspektif normatif.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan yang berkenaan dengan hasil analisis dalam fokus penelitian dan beberapa saran yang menjadi rekomendasi perbaikan dengan beberapa alternatif pilihan agar pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) dapat berjalan dengan baik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pembangunan Dalam Perspektif Administrasi Publik

##### 1. Pengertian Administrasi Publik

Kata administrasi berasal dari Bahasa Inggris "*administration*" atau *to administer*". Kata "*to administer*" dapat berarti "*to manage*" (mengelola) dan "*to direct*" (menggerakkan). Ini berarti administrasi merupakan kegiatan mengelola atau menggerakkan. Kata administrasi juga berasal dari bahasa Belanda *administratie* yang pengertiannya mencakup *stelselmatige verkrijging en verwerking van gegevens* (tata usaha), *bestuur* (manajemen organisasi), dan *beheer* (manajemen sumberdaya). Dari asal kata ini administrasi mencakup kegiatan penatausahaan dan manajemen (Indradi, 2006). Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut Indradi (2006) bahwa ketiga pengertian ini, yaitu *administrate* (latin), *administration* (Inggris) dan *administratie* (Belanda) mempunyai pengertian yang berbeda. Administrasi (terjemahan bahasa latin) berarti adalah sesuatu kegiatan yang bersifat memberikan pelayanan atau servis sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh yang memberikan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kepadanya. Sedangkan administrasi (terjemahan bahasa Inggris) adalah sesuatu kegiatan yang mempunyai makna luas meliputi segenap aktivitas untuk menetapkan kebijakan serta pelaksanaannya. Sementara administrasi (terjemahan dari bahasa Belanda) adalah sesuatu kegiatan yang sifatnya hanya terbatas pada catat mencatat atau ketatausahaan.

Berdasarkan definisi administrasi dari berbagai terjemahan diatas, maka administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari hubungan yang dilakukan sekelompok orang dalam kegiatan tata usaha dan manajemen untuk menetapkan kebijakan dan pelaksanaannya. Dinamika perkembangan ilmu administrasi selalu mengikuti perkembangan zaman, dimana ilmu administrasi saat ini digunakan dalam memberikan pelayanan publik (*public services*). Keban (2004) mengartikan administrasi publik sebagai:

Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Terkait dengan administrasi publik banyak beberapa ahli memberikan pendapat mengenai administrasi publik itu sendiri menurut Nigro dan Nigro dalam Keban (2004) mendefinisikan administrasi publik sebagai berikut :

1. Suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
2. Meliputi tiga cabang pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan diantara mereka.
3. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah.
4. Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perorangan.

Dapat disimpulkan dari beberapa teori ahli diatas, dapat diketahui bahwa administrasi publik merupakan sebuah kegiatan kerjasama serta upaya yang dilakukan organisasi pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan publik yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Administrasi publik berkaitan dengan tiga peran pemerintahan yaitu dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Sehingga, administrasi publik memiliki peran dalam memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan publik kepada masyarakat.

## **2. Pengertian Administrasi Pembangunan**

Siagian (1983) mendefinisikan pembangunan yaitu suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Pembangunan dapat diartikan sebagai proses tindakan untuk mengubah kehidupan dan penghidupan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan perkembangan penduduknya. Selanjutnya Todaro dalam Suharto (2006) mengemukakan bahwa sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait yaitu:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.
- b. Mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan.

- c. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.

Administrasi berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial, politik dan ekonominya agar pembangunan dapat berhasil. Dalam membangun tentunya tidak akan semudah membalik telapak tangan. Perlu usaha-usaha secara sadar, pengorbanan dan proses yang memakan waktu serta harus dilalui dengan kerja sama semua pihak. Upaya-upaya sadar yang dikaitkan dengan negara untuk melakukan perbaikan dikenal dengan istilah administrasi pembangunan.

Pengertian administrasi pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1974) diartikan sebagai proses pengendali usaha (administrasi) oleh pemerintah/negara untuk merealisasi pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan didalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Hal ini mengindikasikan bahwa administrasi pembangunan adalah usaha untuk mendorong atau mendukung perubahan-perubahan suatu masyarakat kearah yang lebih baik di kemudian hari.

Afiffudin (2010) menjelaskan fokus analisis administrasi pembangunan dalam proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara atau bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang dan menyingkirkan ancaman. Disiplin ilmu administrasi

pembangunan memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang lain, yaitu :

- a. Orientasi administrasi pembangunan lebih mengarah kepada usaha perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik.
- b. Administrasi pembangunan melakukan perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.

Dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pada sebuah negara secara sadar dan terencana untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik (modern). Agar dapat melaksanakan pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan maka pemerintah daerah perlu melaksanakan perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah ini adalah demi meningkatkan dan mengembangkan sumber daya yang tersedia di daerah sehingga potensi daerah dapat dimanfaatkan.

### **3. Pengertian Perencanaan**

Perencanaan adalah proses berkelanjutan, yang terdiri dari pembuatan keputusan atau pilihan dengan berbagai cara dalam menggunakan sumber daya yang ada, untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Kegiatan pembangunan akan terarah apabila dilandaskan pada suatu perencanaan pembangunan. Menurut Siagian (1983), perencanaan merupakan proses pemikiran penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka yang telah ditentukan. G.R Terry dalam Moekijat (2000)

mendefinisikan perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dari pengertian diatas digambarkan bahwa perencanaan merupakan proses pemilihan hal-hal tertentu yang untuk mencapai tujuan di masa mendatang.

Soul M.Ketz dalam (Tjokroadmidjojo, 1987) menjelaskan beberapa alasan pentingnya sebuah perencanaan, antara lain :

- a. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan bagi kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
- b. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.
- c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik (*the best alternative*) atau kesempatan untuk memiliki kombinasi cara yang terbaik (*the best combination*).
- d. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
- e. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan/kontrol.

Dari uraian diatas data disimpulkan bahwa perencancan merupakan pedoman penting dalam pengerahan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan memberikan berbagai alternatif dan solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Tanpa adanya perencanaan mustahil suatu kegiatan dapat terlaksana dengan lancar..

#### **4. Pengertian Pembangunan**

Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building) (Siagian, 1983). Menurut Todaro (1988), pembangunan diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap mental masyarakat, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pengentasan kemiskinan. Jadi, pembangunan dapat diartikan sebagai upaya dalam penyesuaian sistem sosial baik individu ataupun kelompok didalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi yang lebih baik.

Pembangunan tidak hanya bertumpu pada dimensi ekonomi, sosial, budaya, struktur masyarakat, dan politik tetapi meliputi dimensi yang lebih luas. Dimensi paradigma pembangunan, antara lain :

- a. Kelestarian lingkungan alam.
- b. Keberlanjutan pembangunan.
- c. Pemerataan distribusi hasil pembangunan.
- d. Kemandirian masyarakat sebagai subjek pembangunan.

- e. Kemitraan para pelaku pembangunan.
- f. Kesatuan masyarakat global.

Melihat dimensi paradigma pembangunan diatas, maka pembangunan bukan hanya sekedar perubahan mendasar terhadap ekonomi, sosial, budaya dan struktur masyarakat. Pembangunan yang dilakukan akan memberikan perubahan mendasar terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan yang baik adalah usaha untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa mendatang dengan ikut memperhatikan kondisi yang akan terkena dampak dari pembangunan tersebut.

### **5. Pengertian Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1984) adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Bratakusumah (2004), perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan- keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental/spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan yaitu sebagai kegiatan perumusan alternatif-alternatif pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien.

Dalam merencanakan sebuah pembangunan mutlak diperlukan persiapan dalam menggunakan sumber-sumber pembangunan. Tjokromikdjojo (1984) mengemukakan tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan sebagai berikut:

a. Penyusunan Rencana

Penyusunan rencana yang meliputi tinjauan keadaan, baik sebelum memulai suatu rencana (*review before take off*) maupun tinjauan terhadap pelaksanaan rencana sebelumnya (*review of performance*), perkiraan keadaan masa yang akan datang (*forecasting*), penetapan tujuan rencana (*plan objectives*) akan dilalui rencana, identifikasi kebijakan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana serta pengambilan keputusan sebagai persetujuan atas suatu rencana.

b. Penyusunan Program Rencana

Penyusunan program rencana yang dilakukan melalui perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan. Tahap ini seringkali perlu dibantu dengan penyusunan suatu tahap *flow-chart*, *operation-plan* atau *network-plan*.

c. Pelaksanaan Rencana

Pelaksanaan rencana (implementasi) yang terdiri atas eksplorasi, konstruksi dan operasi. Dalam tahap ini, kebijakan-kebijakan perlu diikuti implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus menerus memerlukan penyesuaian-penyesuaian.

d. Pengawasan Pelaksanaan Rencana

Tahap selanjutnya adalah pengawasan atas pelaksanaan rencana yang bertujuan untuk mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencana, apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya serta dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan. Untuk maksud tersebut, maka diperlukan suatu sistem *monitoring* dengan mengusahakan pelaporan dan *feedback* yang baik daripada pelaksana rencana.

e. Pengevaluasian

Evaluasi untuk membantu kegiatan pengawasan, yang dilakukan melalui suatu tinjauan yang berjalan secara terus menerus. Disamping itu, evaluasi juga dapat dilakukan sebagai pendukung tahap penyusunan rencana yakni evaluasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana sebelumnya.

Dari hasil evaluasi ini dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya. Perencanaan pembangunan mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk keberhasilan pembangunan karena dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan-kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang memberikan kerangka pemersatu dan membantu untuk memperkirakan peluang-peluang di masa yang akan datang, yang pada akhirnya mengarah kepada pencapaian tujuan pembangunan.

## **B. Good Governance**

### **1. Pengertian Good Governance**

Istilah *Good Governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Menurut World Bank (dalam Wahab, 2002) menyebut *Good Governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu World Bank juga mensinonimkan *Good Governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat. Institusi dari *governance* meliputi tiga domain, yaitu negara, sektor swasta dan masyarakat yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Pemerintah berfungsi untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, dan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan *issue* dalam pengelolaan administrasi pemerintah saat ini. Masyarakat menuntut pemerintah untuk melakukan perubahan yang terarah demi terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan (*governance*) yang baik. Terdapat tiga model pemerintahan yang baik menurut UNDP (United Nation Development Program) yang dikutip oleh Sedarmayanti (2003), antara lain :

- a. *Political Governance* meliputi proses pembuatan keputusan untuk merumuskan kebijakan (*policy/strategy/formulation*)
- b. *Economic Governance* meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi terhadap *equity* (kekayaan), *property* (properti), serta *quality of life* (kualitas hidup).
- c. *Administrative Governance* mengacu pada implementasi kebijakan

Dengan demikian tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Karakteristik *good governance* adalah masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum.

## 2. Prinsip-Prinsip Good Governance

Untuk mewujudkan tata pemerinthan yang baik maka diperlukan prinsip-prinsip *good governance* sebagai tolak ukur kinerja pemerintahan. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003) terdapat prinsip-prinsip *good governance government*, meliputi:

- a. *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu dan tidak ada diskriminasi, tegas serta disiplin sebagai pedoman dalam mengatur pemerintahan yang baik.
- c. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- d. *Responsiveness*, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
- e. *Consensus orientation*, yaitu menjadi suatu jembatan untuk kepentingan-kepentingan yang berbeda untuk terbangunnya masa depan yang baik untuk sekelompok masyarakat.
- f. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. *Efficiency and Effectiveness*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Pertanggung jawabannya bisa dalam bentuk laporan yang dibuat oleh pemerintah setiap tahunnya.

- i. *Strategic vision*, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Menurut Mardiasmo (2009) dari sembilan karakteristik tersebut terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, serta terdapat satu elemen lagi yang dapat mewujudkan *good governance* yaitu *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas).

a. Transparansi

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan *disclosure* yang diberikan harus dapat dipahami dan dimonitori oleh masyarakat. Transparansi mewajibkan adanya suatu sistem informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Transparansi atau keterbukaan dapat dilihat dari tiga aspek, yakni:

- 1) adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan,
- 2) adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah,
- 3) berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif

Ada beberapa indikator dari transparansi, diantaranya:

- 1) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab.

- 2) Kemudahan akses informasi.
- 3) Menyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan uang suap.
- 4) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

b. Partisipasi (*Participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2009). Ada beberapa indikator dari partisipasi, diantaranya:

- 1) Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya, dan bersifat terbuka.
- 2) Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009) adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Ada beberapa indikator dari akuntabilitas, diantaranya:

- 1) Proses pembuatan keputusan yang dibuat tertulis, tersedia bagi yang membutuhkan, memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, sesuai

dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

- 2) Kejelasan dari sasaran kebijakan yang sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku.
- 3) Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas.

d. Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas (*Value for money*)

*Value for money* menurut Mardiasmo (2009) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis, pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan input dengan input *value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi, pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Ada beberapa indikator dari *value for money*, diantaranya:

- 1) Meminimalkan *input* dan memaksimalkan *output* (penggunaan sumber daya finansial secara maksimal).
- 2) Rasio antara *output* dan *input*.
- 3) Keberhasilan organisasi (tujuan tercapai dan program/kegiatan telah dilakukan dengan benar).

### C. *Electronic Government*

#### 1. Pengertian *Electronic Government*

Perkembangan teknologi informasi saat ini, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Hasil pemanfaatan teknologi digital telah melahirkan sebuah bentuk birokrasi pemerintahan yang baru dengan istilah *Electronic Government (e-Government)*. *E-Government* adalah salah satu bentuk dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan kemampuan teknologi digital, dimana hampir semua pekerjaan seperti pelayanan administrasi, pelayanan publik, pengawasan dan pengendalian sumber daya, keuangan, dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. *E-Government* merupakan perkembangan baru terhadap pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien. *E-Government* diharapkan menjadi jawaban atas pelayanan yang diinginkan masyarakat.

Pengertian *E-Government* menurut Indrajit (2004) yaitu merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet, dengan tujuan memperbaiki mutu kualitas pelayanan. Melalui *E-Government* dapat tercipta hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat mengakses berbagi informasi dan layanan yang disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut penerapan *E-Government* diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada manajemen pemerintahan dan dapat digunakan dengan baik.

Menurut Rianto, dkk (2012), *E-Government* merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *E-Government* memberikan peluang dalam meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan privat dan swasta. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi antara komputer dan sistem jaringan komunikasi. Ada 4 (empat) indikator keberhasilan dalam penerapan *E-Government* (Rianto, dkk (2012), yaitu :

- a. Ketersediaan data dan informasi pada pusat data.
- b. Ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan promosi daerah.
- c. Ketersediaan aplikasi *E-Government* pendukung pekerjaan kantor dan pelayanan publik.
- d. Ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan komunikasi antar pemerintah, antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat melalui aplikasi e-mail, SMS, ataupun *teleconference*.

Pengembangan *E-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya pengembangan *E-Government* maka perlu dilakukan penataan sistem dan proses kerja di lingkungan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) kegiatan atau aktifitas yang berkaitan langsung , antara lain :

- a. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.
- b. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Penerapan konsep *E-Government* dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan manfaat, antara lain :

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep *Good Governance*.
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholdernya* untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak berkepentingan.
- e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan *trend* yang ada.
- f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

## 2. Tipe-Tipe Relasi *Electronic Government*

Konsep *E-Government* menurut Indrajit (2002) diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :

### a. *Government to Citizen* (G-to-C)

G-to-C merupakan aplikasi *e-government* yang paling umum digunakan dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat melalui akses yang beragam agar masyarakat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

*Government to citizen* adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, contohnya : pajak *online*, mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial, dokumen pribadi (kelahiran dan akte perkawinan, aplikasi paspor, lisensi pengarah), layanan imigrasi, layanan kesehatan, beasiswa, penanggulangan bencana.

### b. *Government to Business* (G-to-B)

G-to-B digunakan pemerintah untuk menciptakan relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis. Relasi yang baik tersebut diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah dan kalangan bisnis. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah sistem *E-Procurement*.

Manfaatnya adalah :

- 1) Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis *web* untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet;
- 2) Proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dilakukan melalui *website* (sehingga menghemat biaya transportasi dan komunikasi), mulai dari proses pengambilan dan pembelian formulir tender, pengambilan formulir informasi *Term of Reference* (TOR), sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender;
- 3) Proses pengadaan dan pembelian barang kebutuhan sehari-hari lembaga pemerintahan (misalnya untuk *back-office* dan administrasi) dapat dilakukan secara efisien jika konsep semacam *E-Procurement* diterapkan (menghubungkan antara kantor-kantor pemerintah dengan para *supplier*-nya);
- 4) Perusahaan yang ingin melakukan proses semacam merger dan akuisisi dapat dengan mudah berkonsultasi sehubungan dengan aspek-aspek regulasi dan hukumnya dengan berbagai lembaga pemerintahan terkait; dan lain sebagainya

c. *Government to Government* (G-to-G)

G-to-G merupakan hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan tujuan untuk memperlancar kerjasama antar negara dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik dan mekanisme hubungan sosial dan budaya G-to-G

memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi, misalnya : konsultasi secara *online*, *blogging* untuk kalangan legislatif, pendidikan secara *online*, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu. Disamping prestasi pemerintah yang lebih baik sejak reformasi, tentunya penerapan *e-government* ini dapat memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat, antara lain :

- 1) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholdernya* (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
- 2) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Governance* di pemerintahan (bebas KKN);
- 3) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholdernya* untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
- 4) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber- sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
- 5) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan *trend* yang ada; dan
- 6) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah

dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

d. *Government to Employes (G-to-E)*

G-to-E bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja di institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Klasifikasi jenis-jenis bentuk relasi *E-Government* diatas menjadi dasar bahwa implementasi *E-Government* erat kaitannya dengan pihak-pihak tertentu. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan membutuhkan hubungan antar instansi pemerintahan untuk pemenuhan data guna menjaga harmonisasi dan keselarasan antar instansi pemerintah, hubungan dengan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan oleh publik, hubungan dengan kalangan bisnis dengan tujuan untuk menciptakan sistem perekonomian yang baik, dan hubungan dengan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan untuk peningkatan kinerja dan memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### **3. Jenis-Jenis Pelayanan *Electronic Government***

Menurut Indrajit (2004) jenis-jenis pelayanan dalam *e-government*, dibagi menjadi tiga kelas utama :

- a. *Publish*, di dalam kelas *publish* terjadi sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas di akses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui *internet*. Alat yang digunakan adalah

komputer atau *handphone* melalu medium *internet*, dimana alat-alat tersebut dipergunakan untuk mengakses *situs (website)* departemen atau devisa terkait.

- b. *Interact*, pada kelas *interact* terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan, yang pertama adalah bentuk portal dimana *situs* terkait memberikan fasilitas *searching* bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik, kedua adalah pemerintah menyediakan kanal akses dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. *Transact*, pada kelas ini terjadi interaksi dua arah, akan tetapi masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerja pemerintah.

Konsep *E-Government* diterapkan pemerintah dengan tujuan untuk memberikan transparansi demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Dengan adanya *E-Government* diharapkan dapat menjalin hubungan baik antara pemerintah, masyarakat dan swasta secara efisien, efektif dan ekonomis. Proyek *E-Government* diterapkan pemerintah berdasarkan komunikasi satu arah dan dua arah serta jasa layanan yang diberikan pemerintah secara gratis atau dipungut bayaran, pungutan bayaran tersebut dikarenakan pemerintah berkerjasama dengan pihak swasta dalam pemenuhan data untuk informasi yang dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan kelas-kelas tersebut, menggambarkan adanya transparansi antara pemerintah dan masyarakat dalam iklim negara yang demokratis.

#### 4. Kebijakan dan Strategi Pengembangan *Electronic Government*

Dalam lampiran Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, terdapat enam (6) strategi pengembangan *e-government*, sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi keseluruhan wilayah Negara. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah.
- b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.
- c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standarisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antar portal pemerintah. Standarisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik.
- d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis *e-government*.
- e. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Baik pemerintah maupun masyarakat.
- f. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur dalam pengembangan *e-government*, dapat dilaksanakan dengan

empat tingkatan, yaitu: persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.

### 5. Indikator Pengembangan *Electronic Government*

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government (Indrajit, 2004), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah:

#### a. *Support Elemen*

*Support* adalah elemen paling penting dalam pengembangan *e-government* perlu dukungan atau yang disebut *political will* dari pejabat publik. Hal ini agar konsep *e-government* dapat diterapkan, tanpa adanya itu berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* dapat terlaksana.

#### b. *Capacity Elemen*

*Capacity* merupakan sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan *e-government* agar konsep yang telah diciptakan dapat menjadi kenyataan. Terdapat tiga sumber daya yang harus dimiliki, yaitu:

- 1) Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*.
- 2) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan *e-government*.
- 3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan

c. *Value Elemen*

*Value* berdasarkan pada manfaat yang didapat oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai penerima pelayanan *e-government*. Dalam elemen *value* yang menentukan besar tidaknya manfaat *e-government* adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan.

## D. Implementasi Kebijakan

### 1. Pengertian Implementasi

Subarsono (2010) mengartikan implementasi sebagai suatu proses yang dinamis, yang pelaksana kebijakannya melalui aktivitas atau kegiatan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kegiatan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik merupakan kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster (dalam Wahab, 2004) adalah

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip Wahab (2004), bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab (2004) mendefinisikan implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan-tindakan pelaksanaan keputusan kebijakan oleh individu, pejabat atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.

## **2. Pengertian Kebijakan**

Istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris "*policy*", tetapi banyak orang yang berpendapat bahwa istilah kebijakan sama halnya dengan kebijaksanaan. Peneliti berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup peraturan-peraturan yang didalamnya terdapat konteks politik. Menurut Islamy (1997) berpendapat bahwa:

Kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh lagi (lebih menekankan kepada kearifan seseorang), sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya sehingga *policy* lebih tepat diartikan sebagai kebijakan, sedangkan kebijaksanaan merupakan pengertian dari kata *wisdom*.

Sedangkan, pandangan Anderson yang dikutip oleh Wahab (2004), merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi. Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab (2004) bahwa:

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat diatas, maka kebijakan pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu. Umumnya kebijakan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu memiliki hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai.

### **3. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan menurut Nugroho (2003) memiliki dua pilihan dalam mengimplementasikannya, yaitu dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Nugroho memiliki dua pilihan, yaitu mengimplementasikannya dalam bentuk

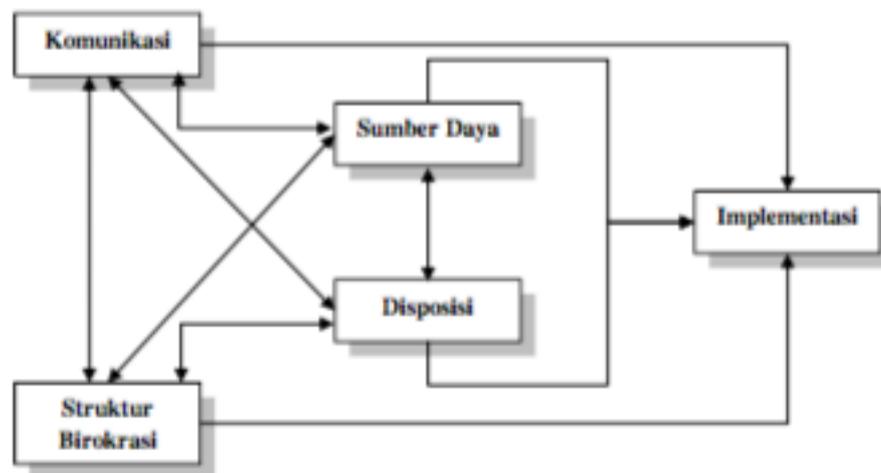
program atau formulasi kebijakan.

Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno (2002) , menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan sebuah upaya pemerintah dalam mencapai tujuan dari kebijakan yang telah dibuat. Oleh karena itu, dalam pembuatan kebijakan pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut akan memberikan manfaat atau merugikan masyarakat.

Implementasi merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dalam menjalankannya. Adapun unsur-unsur implementasi kebijakan meliputi (Wahab, 1990):

- a. Adanya program yang dilaksanakan.
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam implementasi kebijakan harus memiliki unsur program, target dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. George C. Edward III memaparkan model implementasi yang disebut dengan *Direct and Indirect Impact of Implementation* seperti gambar 1 dengan empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu :



**Gambar 1. Model Direct and Indirect Impact of Implementation  
George C.Edward III**

*Sumber : George C.Edward III, dalam Agustino 2006*

a. Komunikasi

Pertama, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan, adalah komunikasi. Menurut Agustino (2006), komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Informasi perlu dikomunikasikan kepada pelaku kebijakan ataupun masyarakat agar dapat memahami isi, tujuan, arah, sasaran, dan manfaat. Implementasi akan terjadi apabila para pembuat keputusan (*decision maker*) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi kebijakan memiliki tiga variabel, yaitu:

1) Transmisi (*Transmission*)

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran

komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

## 2) Kejelasan (*Clarity*)

Kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran.

## 3) Konsistensi (*Consistency*)

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

### b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Indikator- indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya dapat berjalan dengan baik dan rapi, yaitu:

#### 1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk

melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

## 2) Informasi dan Wewenang (*Information and Authority*)

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik.

## 4) Fasilitas (*Facility*)

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

## 4) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah

bahkan akan terjadi *goal displacement* yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai implementasi suatu kebijakan. Jika implementasi suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk mekaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak menjadi bias. Disposisi/Sikap merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, sehingga sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Terdapat tiga elemen yang dapat mempengaruhi disposisi, antara lain:

1) Pengetahuan Terhadap Kebijakan

Pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting dalam mempengaruhi disposisi/sikap pelaksana dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Pengetahuan yang tinggi terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan dapat membantu kelancaran pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman diperlukan dalam memahami maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan

2) Respon Terhadap Kebijakan

Arah respon terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana (*implementor*) apakah menerima, netral, atau menolak tujuan kebijakan

merupakan hal yang sangat penting. Respon baik yang ditunjukkan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan sebuah kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Suatu kebijakan dapat terhambat ataupun gagal diimplementasikan apabila sikap pelaksana menolak tujuan dari kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang tidak jelas dapat menghambat atau bahkan menggagalkan implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Terdapat dua elemen yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, antara lain:

1) *Standart Operational Procedure* (SOP)

Dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operational Procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

2) Fragmentasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

## **D. Sistem Informasi Manajemen**

### **1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen**

Menurut Indrajit (2002) mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya. Sedangkan informasi menurut Sutedjo (2002) merupakan hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan dan dibutuhkan dalam pemahaman fakta-fakta yang ada. Dapat kita tarik suatu definisi baru dari sistem informasi sebagai kumpulan dari sub sistem apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) menurut Chasing yang dikutip Jogiyanto (1993) adalah kumpulan dari manusia dan sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan dan pengendalian. Davis (2002) memberikan definisi sistem informasi manajemen sebagai sebuah sistem pengolahan informasi yang menerapkan kemampuan komputer untuk menyajikan informasi bagi manajemen dan bagi pengambilan keputusan. Dari definis tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan.

## 2. Karakteristik dan Fungsi Sistem Informasi Manajemen

Karakteristik SIM menurut Sutabri (2005) adalah sebagai berikut :

- a. SIM membantu manajer secara terstruktur pada tingkat operasional dan tingkat kontrol saja. Meskipun demikian, SIM dapat digunakan pula sebagai alat untuk perencanaan bagi staf yang sudah senior.
- b. SIM didesain untuk memberikan laporan operasional sehari-hari sehingga dapat memberi informasi untuk mengontrol operasi tersebut dengan lebih baik.
- c. SIM sangat tergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan, serta bergantung pada luar informasi yang dimiliki oleh organisasi tersebut.
- d. SIM biasanya tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah. Kemampuan untuk menganalisis masalah terletak pada *Decision Support Systems*.
- e. SIM biasanya berorientasi pada data-data yang sudah terjadi atau data-data yang sedang terjadi. Bukan data-data yang akan terjadi seperti *forecasting*.
- f. SIM juga berorientasi pada data-data di dalam organisasi dibanding data-data dari luar organisasi. Oleh karena itu, informasi yang dibutuhkan oleh SIM adalah informasi yang sudah diketahui formatnya serta relatif stabil.
- g. SIM biasanya tidak fleksibel karena bentuk laporan-laporan yang dihasilkan banyak sudah dipersiapkan sebelumnya. Beberapa SIM memiliki kemampuan agar manajer dapat membantu laporannya sendiri, tetapi sebenarnya data-data yang dibutuhkan manajer tersebut sudah ada dan sudah disiapkan dulu.

- h. Sebagaimana problematikan yang telah disebutkan diatas, SIM membutuhkan perencanaan yang sangat matang dan panjang, sambil memperhitungkan perkembangan organisasi dimasa mendatang.

Rochaety (2013) mengemukakan SIM yang baik mampu memberikan dukungan pada proses-proses perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Peranan SIM dalam memberikan dukungan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Proses Perencanaan Strategis

Tujuan perencanaan strategis adalah untuk mengembangkan strategi dimana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuannya. Waktu untuk perencanaan strategis membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga perubahan menadasar dalam organisasi bisa diadakan.

b. Proses Pengendalian Operasional dan Manajemen

Pengendalian operasional adalah proses pemantapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian operasional menggunakan prosedur dan aturan keputusan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Sebagian besar keputusan bisa diprogramkan. Pendukung pemrosesan untuk pengendalian operasional terdiri dari :

- a. Suatu transaksi penarikan kembali persediaan menghasilkan suatu dokumen transaksi. Pengolahan transaksi juga dapat menyelidiki persediaan yang ada, dan memutuskan apakah suatu pesanan pembelian persediaan harus diadakan.

- b. Suatu pemeriksaan terhadap file pegawai menjelaskan keperluan untuk suatu posisi. Komputer menyelidiki file pegawai menggunakan program untuk memilih kandidat secara kasar.
- c. Laporan rutin dihasilkan secara periodik. Tetapi suatu aturan keputusan yang diprogramkan dalam suatu prosedur pengolahan laporan bisa menciptakan laporan khusus dalam suatu bidang masalah.

Sedangkan pengendalian manajemen , informasi pengendalian manajemen diperlukan oleh manajer departemen untuk mengukur pekerjaan, untuk diterapkan personalia operasional dan mengalokasi sumber daya. Proses pengendalian manajemen memerlukan jenis informasi sebagai berikut :

- a. Pekerjaan yang telah direncanakan (standar, ekspektasi, anggaran)
- b. Penyimpangan dari pekerjaan yang telah direncanakan
- c. Sebab Penyimpangan

Sistem Informasi Manajemen merupakan sebuah alat yang salah satu fungsinya adalah untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dan pemecahan masalah untuk memperoleh hasil yang akan dilaksanakan. Pengambilan keputusan memiliki peranan yang sangat penting karena keputusan yang diambil oleh pengambil kebijakan merupakan hasil akhir yang harus dilaksanakan oleh seluruh bagian di dalam organisasi.

Salah satu tahap proses yang digunakan dalam pengambilan keputusan menggunakan SIM yang dibuat oleh Simon dalam Taufiq (2013) adalah sebagai berikut :

a. Tahap Penyelidikan

Proses pencarian melibatkan suatu pengujian data dalam cara yang telah ditentukan dahulu maupun dalam cara khusus. SIM harus memeriksa semua data dan menimbulkan suatu permintaan uji pada manusia atau situasi yang jelas menurut perhatian. Baik SIM maupun organisasi harus menyediakan saluran komunikasi untuk persoalan yang diterima agar disampaikan ke atas dalam organisasi sampai diambil tindakan terhadapnya.

b. Tahap Perancangan

SIM harus memiliki model-model keputusan untuk mengolah data dan menimbulkan pilihan pemecahan. Model tersebut harus membantu dalam menganalisis pilihan/alternatif.

c. Tahap Pemilihan

Sebuah SIM adalah paling efektif bila hasil rancangan disajikan dalam suatu bentuk yang mendorong keputusan. Bila pilihan telah diambil, peranan SIM berubah menjadi pengumpulan data untuk umpan balik dan penaksiran kelak.

Salah satu fungsi Sistem Informasi Manajemen (SIM) yaitu membantu pembuat keputusan (*decision maker*) dalam mengambil keputusan dari berbagai alternatif yang ada. Berdasarkan tahapan diatas dapat diketahui terdiri dari 3 tahapan utama dalam proses pengambilan keputusan. Dalam tahap penyelidikan SIM harus memeriksa data yang tersedia dan mengujinya, kemudian pada tahap perancangan data yang telah diuji kemudian diolah, dan pada tahap pemilihan data yang telah diolah disajikan dalam bentuk yang mendorong keputusan.

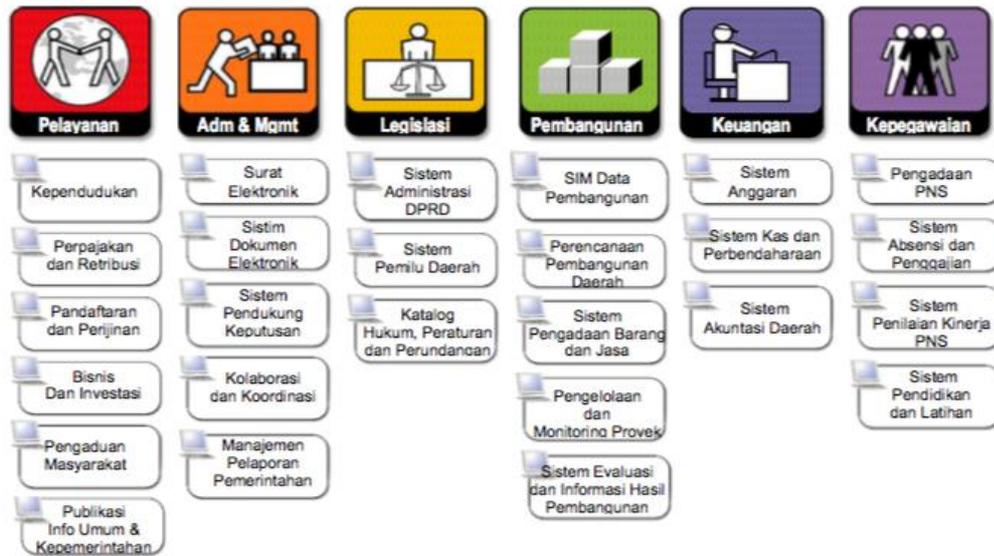
### 3. Sistem Informasi Manajemen Sektor Publik

Pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola organisasi yang lebih baik, sehingga mampu menyediakan pelayanan informasi tepat guna bagi *stakeholder*. Layanan digitalisasi pemerintah dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan internet. Misalnya layanan pengaduan masyarakat berbasis sms, absensi online (*e-absensi*), laporan kinerja SKPD (*e-laporan*), persuratan (*e-office*) yang semua layanan tersebut terpublish pada web induk pemerintah daerah, sekaligus bisa digunakan sebagai alat untuk monitoring dan evaluasi kinerja dilingkup pemerintah tingkat SKPD. Secara umum SIM pada sektor publik memiliki dua pola yaitu :

1. Sistem pendukung keputusan (*decision support system*)
2. Sistem manajemen database untuk layanan umum, program-program sistem informasi dalam lingkup pemerintahan, yaitu :
  - a. Pelayanan KTP *online*
  - b. Website Pemerintah Daerah
  - c. Absensi Sidik Jari
  - d. Papan Informasi Elektrik

Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang *Blueprint* Sistem Aplikasi *e-Government* dengan tujuan agar sistem informasi yang dikembangkan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan layanan publik. Fungsi-fungsi pelayanan, administrasi dan kelembagaan dikelompokkan dalam blok fungsi. Kelompok blok fungsi disusun dalam sebuah

bagan fungsi yang selanjutnya dalam dokumen *blueprint* disebut Kerangka Fungsional Sistem Pemerintahan sesuai dengan gambar 2.



**Gambar 2. Kerangka Fungsional Sistem Pemerintahan**

*Sumber : Blueprint Sistem Aplikasi e-Government*

Dalam mengembangkan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan publik, pemerintah mengkategorikan kebutuhan fungsional layanan publik menjadi enam (6) fungsi dalam setiap fungsi memiliki beberapa blok fungsi sesuai dengan gambar diatas. Pengembangan aplikasi sistem informasi disusun dan dikelompokkan sesuai dengan fungsi-fungsi layanan publik. Dapat diasumsikan bahwa tujuan dari kebijakan pengembangan *Blueprint Sistem Aplikasi E-Government* adalah untuk memberikan pemerataan layanan publik yang diberikan pemerintah sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Faisal (2003) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan menjelaskan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Sedangkan menurut Mukhtar (2013), penelitian deskriptif ialah mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu peristiwa.

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang istilah lainnya yaitu penelitian naturalistik atau alamiah. Pengertian kualitatif yang dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor yang dikutip dalam Moleong (2011), menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah sebagai perbedaan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Sugiyono (2008) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun dengan tujuan untuk mendiskripsikan, menggambarkan, dan melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki (Nazir, 2005). Penggunaan penelitian dengan metode ini peneliti maksudkan untuk memahami secara mendalam persoalan bagaimana praktek dalam melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD), serta faktor determinan sebagai penghambat untuk selanjutnya menemukan langkah untuk perbaikan implementasi SIMPPD pada lingkungan pemerintah Kota Kediri.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan suatu lingkup permulaan yang akan dijadikan sebagai wilayah penelitian, sehingga peneliti akan memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang akan diteliti. Penetapan fokus penelitian juga sebagai upaya pencegahan terjadinya pembiasan didalam mendeskripsikan dan membahas masalah yang sedang diteliti. Menurut Moleong (2011) menjelaskan bahwa penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang *inquiry*. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-

eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh di lapangan.

Menurut Moeleong (2011), dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data mana dan data tentang apa yang diperlukan dan dikumpulkan dan data mana yang tidak relevan sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Jadi, dengan menentukan fokus penelitian seorang peneliti dapat menentukan data yang tepat sehingga penelitian lebih terarah dan dapat menyaring data yang relevan. Selain itu, penentuan fokus penelitian ini adalah agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang ditetapkan, sebagaimana yang dijelaskan Sugiyono (2008) yaitu batasan dalam penelitian kualitatif disebut sebagai fokus yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Berdasarkan pemaparan diatas maka fokus penelitian yang cocok dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori George C. Edward III sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) dalam penyusunan dokumen pembangunan yang akuntabel :
  - a. Komunikasi;
    - 1) Transmisi (*Transmission*)
    - 2) Kejelasan (*Clarity*)
    - 3) Konsistensi (*Consistency*)
  - b. Sumber Daya;
    - 1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

2) Informasi dan Wewenang (*Information and Authority*)

3) Fasilitas (*Facility*)

4) Anggaran (*Budgetary*)

c. Disposisi

1) Pengetahuan Terhadap Kebijakan

2) Respon Terhadap Kebijakan

d. Struktur Birokrasi

1) *Standart Operational Procedure* (SOP)

2) Fragmentasi

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan

Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 pada Pemerintah Kota Kediri :

a. Faktor pendukung

b. Faktor Penghambat

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Moleong (2011) mengemukakan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian, cara terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dengan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan.

Penulis dalam melakukan penelitian ini menentukan wilayah Kota Kediri sebagai lokasi penelitian yang akan dilaksanakan. Alasan pemilihan lokasi ini

didasarkan adanya visi dan misi Kota Kediri untuk meningkatkan *e- government*, kemudian keterjangkauan data juga menjadi pertimbangan peneliti dalam memilih lokasi tersebut. Selain itu alasan mengapa peneliti memilih Kota Kediri sebagai lokasi penelitian karena Kota Kediri telah menerapkan SIM khususnya dalam perencanaan pembangunan semenjak tahun 2011. Hal ini didukung dengan munculnya Peraturan Walikota (Perwal) Kota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD). Penelitian ini mengambil data dan informasi dari instansi yang terkait yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri, yang beralamat di jalan Jend. Basuki Rahmat No.15, telp 628955.

#### **D. Sumber Data**

Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Moeleong (2011) bahwa sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain lain. Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti tidak menggunakan kuesioner melainkan dengan menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data primer, sehingga sumber data dalam penelitian ini disebut informan/narasumber. Sedangkan untuk data sekunder seorang peneliti langsung mendatangi situs penelitian yang dapat memberikan data-data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian.

Berdasarkan sumber, penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2010) sumber data diklasifikan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber yang dapat memberikan informasi yang relevan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Adapun data primer yang diperlukan guna menunjang penelitian ini adalah, hasil wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dan berkapasitas dalam memberikan informasi terkait penerapan SIMPPD pada Barenlitbang Kota Kediri. Kemudian data berbentuk dokumentasi foto atau hasil observasi secara langsung pada kantor Bappeda Kota Kediri dan data berbentuk *capture/screenshot*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu instansi yaitu Barenlitbang Kota Kediri dengan permasalahan di lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan bahan penelitian. Adapun data sekunder yang diperlukan dalam menunjang penelitian ini adalah, Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD), dokumen LKJ. Bentuk hasil *print out software* SIMPPD dan dokumen lain yang dirasa perlu ketika penelitian sedang berjalan.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2010) membedakan teknik pengumpulan data menjadi empat bagian yaitu observasi, *interview*/wawancara, dokumentasi dan gabungan

ketiganya (triangulasi). Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Oleh karena itu untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Cara memperoleh data dengan pengamatan secara langsung di lapangan pada objek penelitian untuk memperoleh data yang dapat mempertajam analisis yang berhubungan dengan penelitian.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, mencatat, dan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa arsip-arsip dan catatan-catatan yang menjadi bahan masukan dalam penyusunan penelitian seperti foto-foto kegiatan yang menjadi agenda Barenlitbang Kota Kediri terkait dengan permasalahan yang diteliti.

c. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan pembicaraan langsung dengan subjek peneliti untuk maksud tertentu. Penggunaan pedoman wawancara ini dimaksudkan agar permasalahan dan data yang ingin dicari peneliti dapat terungkap seluruhnya.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan

penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2008). Selanjutnya menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2008) menyatakan:

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Dalam penelitian ini instrumen atau alat yang digunakan adalah:

1. Peneliti

Penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

2. Pedoman-pedoman wawancara (*interview guide*),

Pedoman Wawancara berguna untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan guna kegiatan penelitian. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara untuk mengetahui data apa yang diinginkan baik untuk memlai pencarian data, maupun memperdalam data yang sudah didapatkan sebelumnya.

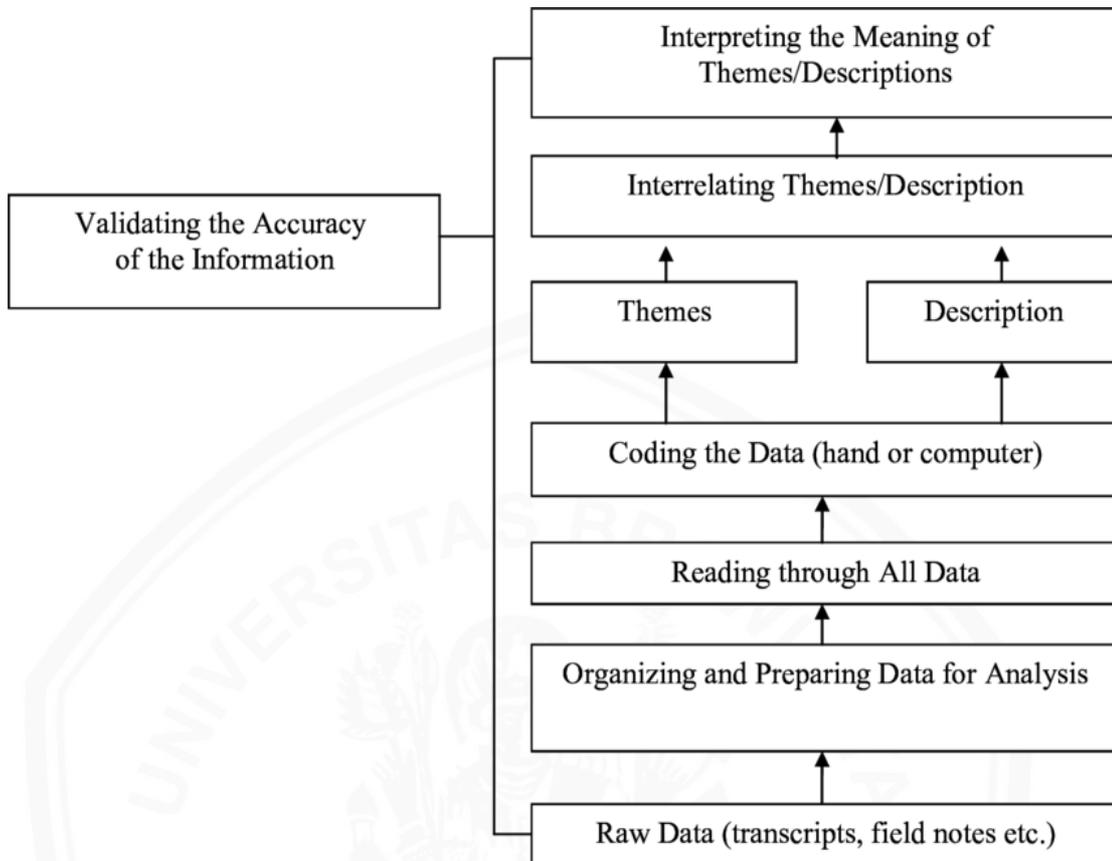
### 3. Alat Dokumentasi lain

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa peralatan penunjang, diantaranya yaitu alat rekaman dan foto melalui HP, serta buku saku kecil.

## **G. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dan yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit-unit, melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2014). Sedangkan menurut Creswell (2012), analisis data merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan proses pengumpulan data secara terbuka yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, interpretasi, dan pelaporan hasil. Dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan proses pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, oberservasi dan dokumentasi dilapangan secara sistematis, menginterpretasikan data, dan membuat kesimpulan hasil.

John W. Creswell mengilustrasikan tahapan-tahapan dalam analisis data kualitatif sesuai dengan gambar 3. berikut :



**Gambar 3. Tahap Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif**

*Sumber : John W. Creswell, 2012*

Tahap analisis data diatas diilustrasikan dalam pendekatan linear dan hierarkis yang dibangun dari bawah keatas, tetapi dalam praktiknya pendekatan ini lebih interaktif dengan beragam tahap yang saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang telah disajikan. Menurut Creswell (2012) terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data, yaitu :

- a. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Tahap ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

- b. Membaca keseluruhan data. Dalam tahap ini, menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.
- c. Menganalisis lebih detail dengan men-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Dalam proses coding ini, penulis mengkombinasikan kode-kode yang telah ditemukan sebelumnya dan membuat kode berdasarkan informasi yang muncul sendirinya. Sehingga, proses coding dalam penelitian ini adalah dengan menyesuaikan kode-kode yang muncul selama proses analisis data dengan data penelitian.
- d. Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Tahap ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu. Hasil-hasil tema inilah yang kemudian dijadikan judul dalam bagian hasil penelitian.
- e. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif. Pendekatan naratif bisa meliputi pembahasan tentang kronologis peristiwa, tema-tema tertentu, atau tentang keterhubungan antar tema.
- f. Menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi juga bisa dimaknai perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. Dalam hal ini, peneliti menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif oleh Creswell dengan tahapan-tahapan dari yang spesifik hingga umum dengan berbagai level analisis yang berbeda. Penulis mengumpulkan dan men-*coding* data untuk mengidentifikasi tema-tema, kemudian disajikan dalam bentuk laporan kualitatif. Tahap terakhir adalah menginterpretasi data dengan membandingkan hasil penelitian dengan informasi dari teori, sehingga peneliti dapat mengetahui apakah informasi teori sesuai dengan hasil penelitian atau justru tidak sesuai dengan hasil penelitian.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

##### 1. Profil Kota Kediri

Kota Kediri merupakan kota terbesar ketiga di Provinsi Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang menurut jumlah penduduk yaitu sebanyak 281.978 jiwa. Kota ini terletak 130 km sebelah barat daya Kota Surabaya dan memiliki luas wilayah 63,40 km<sup>2</sup> yang terdiri atas 3 kecamatan dan 46 kelurahan dan seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Kota Kediri juga merupakan ibukota dari Karesidenan Kediri yang terdiri dari beberapa kota dan kabupaten yaitu Kabupaten Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Blitar dan Trenggalek. Kota Kediri dikenal sebagai pusat perdagangan utama untuk gula dan industri rokok terbesar di Indonesia. Kota Kediri terdapat pabrik rokok kretek Gudang Garam yang telah berdiri dan semakin berkembang. Oleh karena itu, pada tahun 2010 Kota Kediri dinobatkan sebagai peringkat pertama Indonesia dalam *Most Recommended City for Investment*.

Artefak arkeologi yang ditemukan pada tahun 2007 menunjukkan bahwa daerah sekitar Kediri menjadi lokasi kerajaan Kediri, sebuah kerajaan Hindu di abad ke-11. Kota Kediri terbelah menjadi dua bagian oleh sungai Brantas yang membujur dari selatan ke utara sepanjang 7 kilometer, yaitu wilayah barat sungai dan timur sungai. Secara administrasi, Kota Kediri terbagi menjadi tiga kecamatan yaitu, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren. Wilayah

barat sungai termasuk dalam wilayah Kecamatan Mojoroto, sementara wilayah timur sungai termasuk dalam wilayah Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren.

## **2. Kondisi Geografis**

Secara geografis, Kota Kediri terletak di antara 111,05 derajat - 112,03 derajat Bujur Timur dan 7,45 derajat-7,55 derajat Lintang Selatan dengan luas 63,404 Km<sup>2</sup>. Dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 m diatas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40% struktur wilayah Kota Kediri terbelah menjadi 2 bagian oleh sungai Brantas, yaitu bagian sebelah timur dan barat sungai. Wilayah dataran rendah terletak di bagian timur sungai, meliputi Kec. Kota dan kec. Pesantren, sedangkan dataran tinggi terletak pada bagian barat sungai yaitu Kec. Mojoroto yang mana di bagian barat sungai ini merupakan lahan kurang subur yang sebagian masuk kawasan lereng Gunung Klotok (472 m) dan Gunung Maskumambang (300 m). Bagian timur sungai merupakan lahan yang relatif subur dengan relief tanah yang datar. Dikaki Gunung Klotok terdapat situs sejarah berupa Goa Selomangleng, goa ini merupakan pesanggrahan Dewi Kilisuci putri Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan. selainitu terdapat relief kisah Patih Butho Locoyo, yang setia mendampingi Dewi Kilisuci dan simbol Butho Locoyo ini menjadi Lambang Kota Kediri. Peta administrasi Kota Kediri dapat dilihat dalam gambar 4. berikut :



### 3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kota Kediri pada Tahun 2013 sebanyak 267.310 jiwa atau mengalami penurunan dibanding jumlah penduduk Tahun 2012 sebanyak 312.331. Secara lengkap, komposisi penduduk Kota Kediri dari Tahun 2009-2013 menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

**Tabel 2 . Jumlah Penduduk Kota Kediri Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Kediri Tahun 2009-2013**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
< 1	2.176	2.501	4.096	3.910	3.144
1 – 4	16.623	18.270	18.156	18.224	15.700
5 – 9	24.321	24.049	24.380	25.236	21.466
10 – 14	21.350	21.763	22.093	23.312	20.780
15 – 19	20.998	20.508	20.473	21.452	18.602
20 – 24	25.085	23.210	22.359	22.319	18.508
25 – 29	32.582	28.518	28.722	28.443	22.346
30 – 34	28.139	26.637	28.000	30.148	26.094
35 – 39	24.634	24.089	24.596	25.592	22.166
40 – 44	23.899	22.260	22.933	23.978	20.581
45 – 49	20.301	20.712	21.360	21.652	19.022
50 – 54	18.398	18.230	18.976	19.543	16.856
55 – 59	13.046	13.360	14.812	15.458	13.967
60 – 64	9.179	8.974	10.597	10.785	9.348
≥ 65	17.232	17.991	21.119	22.279	18.727
<b>JUMLAH</b>	<b>297.963</b>	<b>290.991</b>	<b>302.672</b>	<b>312.331</b>	<b>267.310</b>

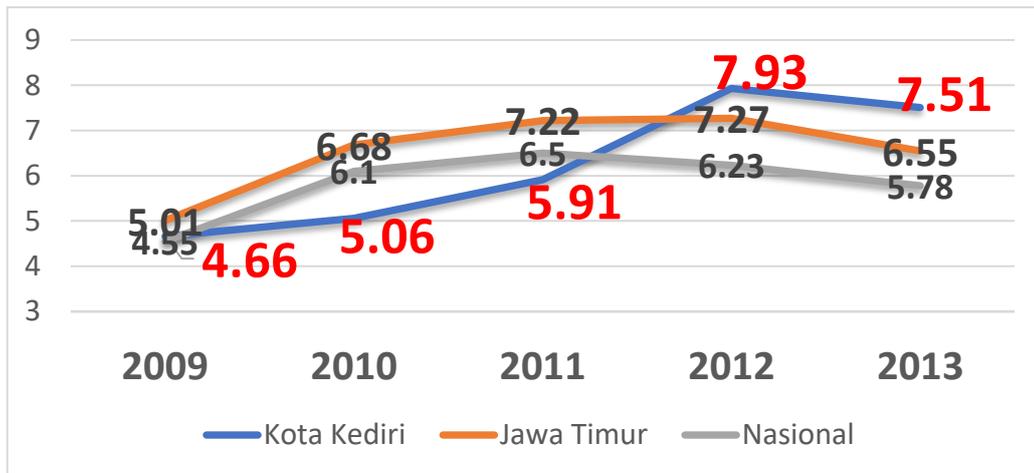
Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014-2019

Laju pertumbuhan penduduk Kota Kediri pada tahun 2012 – 2013 menurun 14,41%, padahal sebelumnya selama periode tahun 2003 – 2012 mempunyai rata-rata pertumbuhan penduduknya per tahun sebesar 0,81 %. Adapun penurunan ini terjadi karena *up-date* data kependudukan berdasarkan pembuatan KTP secara

elektronik yang mereduksi sebagian besar identitas ganda dari beberapa daerah. Selain itu perlambatan pertumbuhan penduduk ini tidak serta mengurangi beban daya dukung wilayah Kota Kediri. Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) maka di sekitar Kota Kediri seperti Kabupaten Kediri sebagai daerah *hinterland* terutama yang berbatasan dengan Kota Kediri mengalami peningkatan jumlah penduduk. Pertumbuhan Komersial di Kota Kediri mendorong peningkatan harga properti, menyebabkan lokasi perumahan bergeser di wilayah sekitar Kota Kediri tumbuh semakin cepat. Jumlah penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun) Kota Kediri pada tahun 2013 juga relatif tinggi yaitu berjumlah 187.493 orang atau sekitar 70,14% dibandingkan dengan besaran penduduk pada usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas yang hanya 29,77%. Tingginya jumlah penduduk usia produktif Kota Kediri ini tentu menjadi modal dasar pembangunan di Kota ini.

#### **4. Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri**

Pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri secara fluktuatif menunjukkan trend peningkatan disetiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri di tahun 2013 adalah 7,51%. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional maupun Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri pada tahun 2012, lebih tinggi bila dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Regional Jawa TIMUR (7,27%) dan Nasional (6,3%). Secara umum perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Kediri dapat digambarkan pada gambar di bawah ini :



**Gambar 5. Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri (%)**

*Sumber: RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019*

Selanjutnya data perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Kediri berdasarkan per sektor lapangan usaha dapat dilihat pada tabel 3. ini:

**Tabel 3. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri Tahun 2009-2013 (%)**

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	0,91	2,23	1,62	3,58	2,26
2	Pertamb. & Penggalian	12,93	-35,17	0	0	-65,55
3	Industri pengolahan	3,75	3,87	5,87	4,94	6,39
4	Listrik, gas & air bersih	3,81	3,49	4,27	7,52	6,68

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
5	Bangunan	30,79	5,90	5,16	8,99	9,09
6	Perdagangan, Hotel & Resto	7,82	8,49	6,31	19,3	11,09
7	Pengangkutan & Komunikasi	10,16	11,20	5,54	11,76	10,80
8	Keu. Persewaan & jasa pers	5,27	8,27	5,79	7,45	7,59
9	Jasa-jasa	7,94	8,77	4,91	7,55	8,13
	Pertumbuhan	4,70	5,06	5,91	7,93	7,51

Sumber : RPJMD Kota Kediri 2014-2019

Adapun untuk mengetahui potensi masing-masing sektor suatu wilayah terhadap perekonomian global dapat digunakan metode *Analisis LQ*. Apabila nilai  $LQ \geq 1$  berarti sektor tersebut termasuk sektor basis (unggulan) dan apabila nilai  $LQ < 1$  berarti sektor tersebut termasuk sektor non basis (bukan unggulan). Berdasarkan metode ini potensi masing-masing sektor pendukung PDRB Kota Kediri terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur dapat diketahui.

Terlihat pada tabel 3., bahwa potensi yang amat dominan di Kota Kediri pada tahun 2012-2013 terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur terletak pada sektor industri pengolahan yakni terutama pada sektor industri rokok (PT. Gudang Garam). Adapun untuk sektor yang bisa dikatakan mendekati potensi dalam skala

perekonomian Provinsi Jawa Timur terletak pada sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai LQ sebesar 0,71 (2012) dan 0,72 (2013), dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan nilai LQ sebesar 0,81 (2012) dan 0,80 (2013). Hal ini nampak jelas dengan mengeluarkan angka pengaruh PT. Gudang Garam terhadap PDRB Kota Kediri, sehingga nilai LQ untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi sebesar 2,51 (2012) dan 2,22 (2013). Sedangkan nilai LQ untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 2,73 (2012) dan 2,47 (2013). Untuk lebih jelasnya potensi masing-masing sektor pendukung PDRB Kota Kediri terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur dapat diketahui dari tabel 4 di bawah ini :

**Tabel 4. Potensi Sektor PDRB Kota Kediri terhadap Perekonomian Provinsi Jawa Timur dengan dan tanpa PT. Gudang Garam, 2012-2013**

Sektor	Dengan PT. Gudang Garam		Tanpa PT. Gudang Garam	
	2012 *	2013 **	2012 *	2013 **
I. Pertanian	0,01	0,01	0,04	0,03
II. Pertambangan Dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Industri Pengolahan	<b>2,64</b>	<b>2,65</b>	0,51	0,34
IV. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,21	0,23	0,73	0,71
V. Konstruksi	0,04	0,05	0,16	0,14
VI. Perdagangan, Hotel Dan Restoran	0,71	0,72	<b>2,51</b>	<b>2,22</b>
VII. Pengangkutan Dan Komunikasi	0,14	0,13	0,44	0,39
VIII. Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	0,81	0,80	<b>2,73</b>	<b>2,47</b>
IX. Jasa - Jasa	0,16	0,17	0,55	0,52

Keterangan : \* : Angka sementara

\*\* : Angka sangat sementara

Sumber : RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019

## 5. Visi dan Misi Kota Kediri Tahun

Visi pembangunan Kota Kediri yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah “**Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi**”

Dengan penjelasan sebagai berikut :

### **Kota Kediri Lebih Sejahtera**

Adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur, yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan (juga tata pemerintahan) yang aman dan tenteram, rukun dan damai, di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (*basic needs*) menjadi prasyarat untuk mencapai kondisi sejahtera dengan standar hidup yang layak. Sehingga dapat terwujud masyarakat Kota Kediri yang lebih sejahtera, hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa dan makmur.

### **Kota Kediri Lebih Berkeadilan**

Adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang-

seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarginalisasi. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

### **Kota Kediri Lebih Berdaya Saing**

Adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Kota Kediri, bukan hanya berdasarkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Hal tersebut menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta semakin meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor, khususnya menghadapi ASEAN Economic Community pada 2015. Di samping itu Kota Kediri Lebih Berdaya Saing juga berkait dengan upaya meningkatkan daya saing dan kemandirian budaya lokal menghadapi ASEAN Socio-Cultural Community pada 2015, agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio-kultural ASEAN maupun budaya asing lainnya.

### **Kota Kediri Lebih Berakhlak**

Adalah terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual. Dengan akhlak yang baik maka akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sehingga proses pembangunan maupun pemerintahan akan terhindar dari permasalahan dan konflik sara.

### **Kota Kediri Tanpa Korupsi :**

Adalah bahwa penataan Kota Kediri melalui upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Kediri pada dasarnya merupakan tujuan yang ingin dipenuhi oleh Pemerintah Kota Kediri saat ini. Kondisi tersebut secara ideal dapat terwujud bila dalam pelaksanaan pemerintahan dapat bersih dan bebas dari korupsi. Dimana untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi maka perwujudan reformasi birokrasi dan good governance mutlak diperlukan. Perbaikan tata kelola pemerintah ini akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik yang nantinya penting dalam pencegahan kolusi, nepotisme dan konflik kepentingan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Sehingga melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Governance*) maka upaya menata Kota Kediri tanpa korupsi akan terwujud.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Sesuai dengan harapan untuk mewujudkan “Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi”, maka ditetapkan misi pembangunan sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkannya. Keterkaitan visi dan misi dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :

**Tabel 5. Keterkaitan Visi dan Misi**

Visi	Misi
<b>Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi</b>	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan
	Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman, dan ramah lingkungan
	Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan
	Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata dan industri kreatif

(Sumber : RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019)

Makna dari Visi “Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi”, secara substansi terjabarkan didalam 4 (misi) pembangunan. Lebih lanjut makna yang terkandung didalam 4 (empat) misi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan.**

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang sangat penting saat ini, dimana rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari buruknya tata kelola pemerintahan itu sendiri. Sehingga melalui misi ini dimaksudkan untuk menghadirkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani masyarakat. Wujud nyata dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

Elemen terpenting untuk memperbaiki tata kelola pemerintah ini yaitu melalui pembangunan birokrasi yang kuat. Upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan didukung kompetensi aparat yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran (*right sizing*), sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta adanya sistem modern berbasis IPTEK menuju pengelolaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) merupakan aspek utama dalam *bureaucration reform*. Perbaikan tata kelola pemerintah ini akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik, yang nantinya penting dalam pencegahan kolusi, nepotisme dan konflik kepentingan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Hal tersebut didukung pula melalui peran serta masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik dalam pembangunan.

Sehingga melalui perbaikan tata kelola pemerintahan maka dapat terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Governance*). Perwujudan misi ini, sebagai upaya Pemerintah Kota Kediri untuk mewujudkan makna dari visi “**Kota Kediri Tanpa Korupsi**” dapat tercapai.

**Misi 2 : Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman, dan ramah lingkungan**

Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh masyarakat Kota Kediri melalui pembangunan yang adil dan merata, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hal ini adalah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang termarginalisasi.

Pembangunan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat tersebut, utamanya dilakukan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar perkotaan yang mampu mendukung pengembangan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dimana pembangunan tersebut harus memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, yang pada akhirnya dapat merwujud pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, indah dan ramah terhadap lingkungan. Perwujudan misi ini, sebagai upaya Pemerintah Kota Kediri untuk dapat mewujudkan makna dari visi “**Kota Kediri lebih Berkeadilan**” dapat tercapai.

**Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan**

Melalui misi ini, dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Kota Kediri yang agamis, bermoral, memiliki tingkat kesejahteraan yang baik, dan berbudaya, serta mewujudkan Kota Kediri sebagai pusat pendidikan. Hal tersebut dapat tercapai melalui peningkatan pelayanan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan derajat kehidupan keluarga berakhlak dan bermoral, serta melalui pengembangan dan pelestarian budaya lokal. Sehingga melalui pencapaian misi ini pemerintah Kota Kediri dapat mewujudkan visi yang telah disusun, yaitu untuk mewujudkan “**Kota Kediri Lebih Sejahtera dan Lebih Berakhlak**”.

**Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif**

Dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi pada sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, serta industri kreatif. Keadaan ini sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing yang ada di Kota Kediri melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif guna meningkatkan investasi di Kota Kediri, peningkatan usaha ekonomi kerakyatan, peningkatan produktifitas pertanian, peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan pertumbuhan usaha perdagangan, serta peningkatan usaha perindustrian. Maka melalui misi ini Pemerintah Kota Kediri berusaha untuk mewujudkan visi yang telah disusun, yaitu untuk mewujudkan “**Kota Kediri Lebih Berdaya Saing**”.

## **B. Profil Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan**

### **Kota Kediri**

#### **1. Visi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan**

##### **Kota Kediri**

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, aspiratif, inovatif dan produktif serta menentukan arah dan tujuan perencanaan sekaligus menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan menjadi komitmen seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan perencanaan tersebut. Bappeda sebagai institusi yang menjalankan urusan perencanaan pembangunan dengan kewenangan yang dicantumkan dalam 13 pasal Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya, menjadikan Bappeda lembaga strategis yang keberadaannya menjadi lokomotif dan *think tank*-nya pembangunan daerah. Besarnya kewenangan yang dimiliki Bappeda, ternyata belum diimbangi dengan tingkat aplikasi dokumen perencanaan ataupun kajian yang dihasilkan, hal ini ditandai dengan masih banyaknya produk-produk yang dihasilkan Bappeda yang belum dijadikan acuan/pedoman bagi SKPD-SKPD terkait dan dalam proses pengambilan kebijakan Pemerintah Kota.

Berdasarkan uraian di atas, dan sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam Misi 1 : **Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan** dan Misi 2 : **Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman dan ramah**

**lingkungan** yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014-2019 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjawab tantangan lingkungan strategis yang akan dihadapi sebagai suatu institusi perencana daerah maka Bappeda Kota Kediri menetapkan visi untuk periode tahun 2014-2019 adalah ***“Terwujudnya Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang profesional dan berkualitas”***.

Rumusan visi tersebut dapat dimengerti melalui makna yang terkandung didalamnya, sebagai berikut :

1) *Bappeda Kota Kediri mampu menghasilkan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas. Maksudnya* adalah apabila perencanaan yang disusun memenuhi kriteria antara lain: dapat diimplementasikan dan mencapai target yang telah ditetapkan, disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta mendukung perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan yang berkualitas akan dapat dihasilkan apabila didalam proses penyusunan memperhatikan prinsip :

- *Partisipatif* maksudnya adalah bahwa proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara objektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan kesepakatan bersama dan diterima semua pihak. Oleh sebab itu dalam setiap proses perencanaan pembangunan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif

tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan.

- *Sinergis* maksudnya proses perencanaan pembangunan yang lebih mengoptimalkan integrasi dan sinkronisasi keragaman sumber daya yang dimiliki masing-masing komponen.
  - *Inovatif* dimaksudkan bahwa proses perencanaan pembangunan yang menekankan hadirnya prosedur/model, gagasan, praktek/cara yang baru untuk diterapkan sebagai sarana perbaikan/pengembangan sistem guna menghadapi tantangan perubahan di masa datang sehingga mampu mewujudkan perencanaan yang lebih baik dan produktif.
  - *Aplikatif* adalah produk-produk perencanaan yang dihasilkan dapat diaplikasikan sesuai dengan mudah dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pedoman bagi SKPD maupun pemangku kepentingan lainnya, serta sesuai dengan kemajuan perkembangan peradaban masyarakat, sehingga dokumen perencanaan secara nyata dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan.
  - *Akuntabel* maksudnya dokumen perencanaan yang disusun dapat dipertanggungjawabkan mulai dari proses dan mekanisme penyusunan hingga produk yang dihasilkan sesuai peraturan yang berlaku.
- 2) *Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas akan dapat dihasilkan dengan dukungan tenaga-tenaga perencana profesional, maksudnya dokumen perencanaan daerah yang dihasilkan disusun oleh SDM yang memiliki keahlian/kemampuan, mendapat pengakuan (kompetensi) menguasai*

informasi, berfikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. Penetapan Visi tersebut juga didukung oleh fakta dan data bahwa fungsi perencanaan dimasa mendatang sangat strategis dan menentukan kemajuan suatu daerah. Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada masa mendatang diperlukan langkah dan tindakan pemantapan lembaga perencanaan pembangunan sebagai lembaga yang profesional dan berkualitas. Pemantapan fungsi dan peran perencanaan pembangunan ke depan harus melalui upaya-upaya yang lebih cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Misi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri**

Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal sehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap *stakeholder* untuk mengambil bagian dalam pembangunan. Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat Barenlitbang dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, aplikatif dan transparan.
- b. Mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi sebagai dasar keberlanjutan sistem perencanaan pembangunan daerah.
- c. Mewujudkan perencanaan tata ruang kota sebagai landasan pembangunan berkelanjutan.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri adalah lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Badan perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 21 Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

#### **a. KEPALA BADAN**

Tugas pokok :

- 1) Memimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; dan
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Fungsi pokok :

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Dinas, Badan/Kantor/Bagian yang ada dalam lingkungan pemerintah daerah;
- 3) Penyusunan pola dasar pembangunan daerah tahunan, menengah dan jangka panjang;
- 4) Penyusunan kebijakan rencana penanaman modal;
- 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan mengadakan pengendalian untuk kepentingan perencanaan program program pembangunan daerah;
- 8) Penyiapan dan pengembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 9) Pengkoordinasian kegiatan kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya, serta antar lembaga lain;
- 10) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembangunan daerah;
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

**b. SEKRETARIAT**

Tugas pokok :

Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya, bidang perekonomian, bidang fisik dan prasarana wilayah, bidang litdal dan kerjasama daerah, serta pembuatan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Fungsi pokok :

- 1) Pelaksana Koordinasi penyusunan program kerja bidang pemerintahan dan Sosial budaya, bidang perekonomian, bidang fisik dan prasarana wilayah, bidang fisik dan prasaran wilayah, bidang litdal dan kerjasama daerah;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan/anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan kesekretariatan;
- 4) Pelaksanaan penyusunan laporan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 5) Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBD, Perubahan APBD; dan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA**

Tugas pokok :

Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial budaya, pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, pemberdayaan perempuan

dan KB serta kependudukan.

Fungsi pokok :

- 1) Pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial budaya, pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB, serta kependudukan;
- 2) Pengkoordinasian dan pengintegrasian perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial budaya, pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB serta kependudukan;
- 3) Menginventarisasi permasalahan bidang pemerintahan, sosial budaya, pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, pemberdayaan perempuan, KB, dan kependudukan serta merumuskan langkah langkah kebijakan pemecahannya;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan bidang lain dalam penyusunan program tahunan dan pelaksanaannya dibidang pemerintahan, sosial budaya, pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB, serta kependudukan; dan
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dengan tugas dan fungsinya.

**d. BIDANG FISIK DAN PRASARANA WILAYAH**

Tugas pokok :

Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang pemukiman, tata ruang, lingkungan hidup, pengairan, prasarana wilayah dan perhubungan.

Fungsi pokok :

- 1) Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan bidang permukiman, tata ruang, lingkungan hidup, pengairan, prasarana wilayah dan perhubungan;
- 2) Melaksanakan koordinasi dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan bidang permukiman, tata ruang, lingkungan hidup, pengairan, prasarana wilayah dan perhubungan;
- 3) Melaksanakan survey dan pemetaan tata ruang;
- 4) Melaksanakan perencanaan tata ruang;
- 5) Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kota;
- 6) Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang permukiman, tata ruang, lingkungan hidup, pengairan, prasarana wilayah dan perhubungan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- 7) Melaksanakan koordinasi penyusunan program tahunan dan pelaksanaannya dibidang fisik dan prasarana wilayah; dan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. **BIDANG PENELITIAN, PENGENDALIAN DAN KERJASAMA DAERAH**

Tugas pokok :

Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengendalian, statistik, pelaporan, kerja sama daerah dan pengembangan sistem perencanaan.

Fungsi pokok :

- 1) Perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengendalian, statistik, pelaporan, dan kerjasama daerah;
- 2) Pengkoordinasian dan pengintegrasian perencanaan pembangunan dibidang perencanaan pembangunan penelitian, pengendalian, statistik, pelaporan, dan kerjasama daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi rencana penyusunan program tahunan bidang penelitian, pengendalian, statistik, pelaporan dan kerjasama daerah;
- 4) Penginventarisasian permasalahan di bidang penelitian, pengendalian, statistik, pelaporan dan kerjasama daerah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. **BIDANG PEREKONOMIAN**

Tugas pokok :

Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan industri, perdagangan, pertambangan dan energi, koperasi dan pengembangan dunia usaha, pariwisata, pertanian, perkebunan dan peternakan.

Fungsi pokok :

- 1) Pelaksana perencanaan pembangunan bidang industri, perdagangan, pertambangan dan energi, koperasi dan pengembangan dunia usaha, pariwisata, pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan;
- 2) Pengkoordinasian dan pengintegrasian perencanaan pembangunan bidang

industri, perdagangan, pertambangan dan energi, koperasi dan pengembangan dunia usaha, pariwisata, pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan yang disusun oleh SKPD dan satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah;

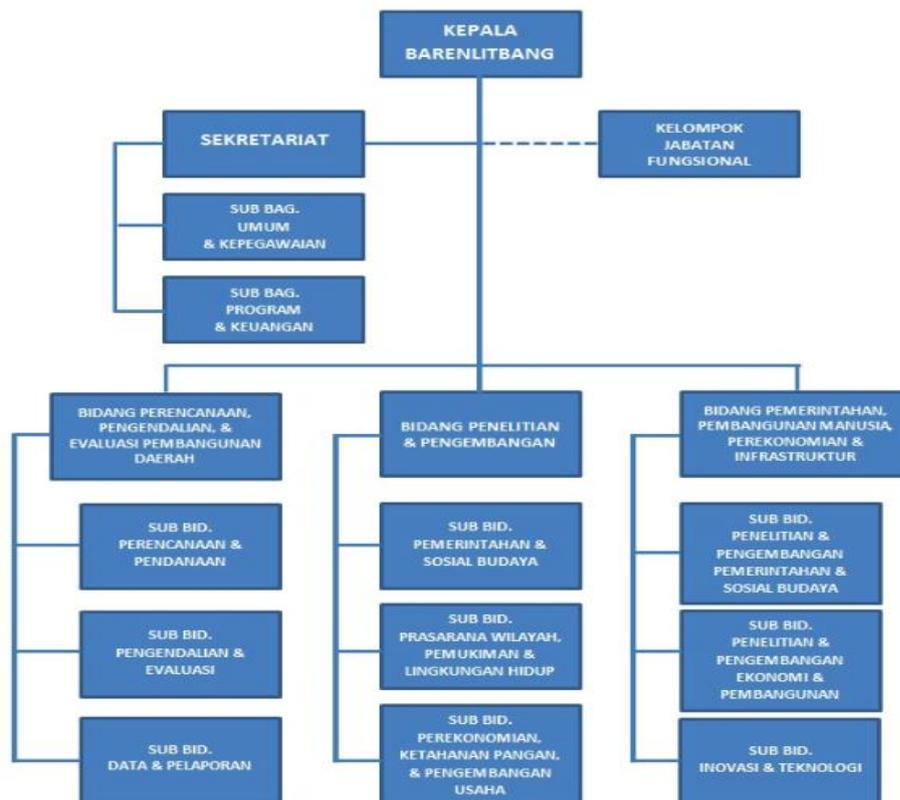
- 3) Penginventarisasi permasalahan dibidang industri, perdagangan, pertambangan dan energi, koperasi dan pengembangan dunia usaha, pariwisata, pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- 4) Pelaksana koordinasi penyusunan program tahunan dan pelaksanaannya dibidang industri, perdagangan, pertambangan dan energi, koperasi dan pengembangan dunia usaha, pariwisata, pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan; dan
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. **SATUAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Bappeda sebagai instansi yang melaksanakan perencanaan pembangunan, seharusnya memiliki kelompok jabatan fungsional perencana agar proses perencanaan berjalan dengan optimal. Namun, hingga saat ini Bappeda Kota Kediri belum memiliki kelompok jabatan fungsional dikarenakan kebijakan dari Pemerintah Kota Kediri yang belum mengakomodasi adanya jabatan fungsional perencana yang meliputi diklat jabatan fungsional dan belum adanya tim penilai angka kredit untuk jabatan fungsional tersebut.

#### 4. Struktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri adalah lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Badan perencanaan pembangunan daerah Kota Kediri, secara lengkap Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Kediri dapat dilihat dari Gambar 6 berikut :



**Gambar 6. Struktur Organisasi Barenlitbang Kota Kediri**

*Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Kediri Tahun 2014-2019*

## 5. Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Kediri

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan dimasa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Barenlitbang Kota Kediri berdasarkandata dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai bulan Oktober Tahun 2014 berjumlah 54 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Kota Kediri dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

**Tabel 6. Sumber Daya Manusia di Barenlitbang Kota Kediri**

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	5
3.	ESELON IV	11
4.	STAF	31
<b>JUMLAH :</b>		<b>48</b>

Sumber : Renstra Kota Kediri Tahun 2014

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 6, dengan jenjang eselonering II, Bappeda menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain. Bidang perencana di Barenlitbang bermitra dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Barenlitbang melalui 4 (empat) bidang perencana yaitu Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Perekonomian, Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, Bidang Litdal dan Kerjasama Daerah.

Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV dan jumlah karyawan yang lebih banyak daripada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup tinggi. Kondisi kepegawaian Barenlitbang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 7. dibawah ini :

**Tabel 7. Kepegawaian Barenlitbang Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH (ORANG)
		SD	SLTP	SLTA	D1	D3	S1	S2	S3	
1.	Struktural									
	1) Eselon II	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	2) Eselon III	-	-	-	-	-	-	5	-	5
	3) Eselon IV	-	-	-	-	-	1	10	-	11
2.	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Staff PNS	-	1	-	1	1	28	-	-	31
4.	Honorar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH :</b>		-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>16</b>		<b>48</b>

(Sumber : Renstra Barenlitbang Kota Kediri Tahun 2014)

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 7, tingkat pendidikan karyawan Barenlitbang yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 28 orang (51%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan Bappeda yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Barenlitbang secara umum. Jumlah karyawan Barenlitbang yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar, tercatat sebanyak 20 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 37% dari seluruh karyawan Barenlitbang, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Barenlitbang sebagai lembaga perencana secara optimal

### **C. Penyajian Data**

#### **1. Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) dalam Penyusunan Dokumen Pembangunan yang Akuntabel**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Kediri adalah institusi perencana yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan daerah ini dilakukan bersama institusi lain di daerah dan masyarakat melalui mekanisme yang telah diatur dalam perundang-undangan. Keterlibatan banyak stakeholder baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan seperti data dan informasi yang tidak akurat, kurangnya koordinasi

dan SDM, keterlambatan dan kesalahan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Hal tersebut kemudian didukung dengan adanya hasil wawancara dengan Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri sebagai berikut :

“Kendala dalam proses perencanaan pembangunan yang sering kita alami, pertama kurangnya data dan informasi yang kita terima, kemudian kurangnya sumberdaya terkait proses tersebut, sering terjadi miskomunikasi antara kita dengan dinas perangkat daerah lainnya maupun masyarakat jadi sulit untuk menepati jadwal proses perencanaan yang sudah kami tentukan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk memudahkan kita dalam melakukan tahapan-tahapan perencanaan, kita mulai menerapkan teknologi informasi.(Hasil wawancara dengan Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri pada tanggal 5 Januari 2018 pukul 11.30 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri).

Pemerintah Kota Kediri dalam upaya menuju tata kelola *E-Government* mulai mengembangkan berbagai aplikasi sistem untuk mendukung kemudahan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kota Kediri melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait pengembangan sistem *E-Government*. Pemerintah Kota Surabaya dinilai telah berhasil dalam menerapkan *E-Government*, meliputi *e-budgeting*, *e-procurement*, *e-delivery*, *e-controlling*, *e-performance*, *e-payment*, hingga *e-health*. Hal ini didukung dengan adanya hasil wawancara dengan Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri sebagai berikut :

“Pemkot Kediri melakukan kesepakatan kerjasama dalam pengembangan *E-Government* dengan Pemkot Surabaya. Kita menilai Pemkot Surabaya sudah cukup berhasil mengaplikasikan teknologi informasi di dalam pemerintahannya. Sehingga kita dari Barenlitbang juga beserta beberapa teman-teman SKPD lainnya ikut belajar dari Pemkot Surabaya.(Hasil

wawancara dengan Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri pada tanggal 5 Januari 2018 pukul 11.30 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri).

Pernyataan dari Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan tersebut diperkuat lagi dengan adanya data hasil pemeringkatan *E-Government* oleh Kementerian KOMINFO. Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) merupakan kegiatan yang diadakan oleh Direktorat *e-Government*, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian KOMINFO) yang melibatkan instansi-instansi Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan PeGi ini merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah secara nasional. Pemeringkatan *e-Government* berdasarkan Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2010 ditunjukkan dalam tabel 8. berikut:

**Tabel 8. Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGi) Berdasarkan Kota/Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2010**

No	Daerah	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEBIJAKAN	KELEMBAGAAN	INFRASTRUKTUR	APLIKASI	PERENCANAAN		
1	Kota Surabaya	3.30	2.84	3.77	3.43	3.00	3.27	Baik
2	Kota Malang	2.88	2.88	2.74	2.75	2.85	2.82	Baik
3	Kab. Lamongan	2.84	3.00	2.75	2.63	2.38	2.72	Baik
4	Kab. Malang	2.40	2.72	2.66	2.48	1.70	2.39	Kurang
5	Kab. Sidoarjo	2.06	2.30	2.32	2.81	1.81	2.26	Kurang
6	Kab. Pasuruan	2.28	2.80	2.07	2.09	1.75	2.20	Kurang
7	Kota Probolinggo	2.63	2.60	1.93	2.25	1.44	2.17	Kurang
8	Kab. Mojokerto	1.88	2.40	1.94	1.70	2.00	1.98	Kurang
9	Kab. Sumenep	2.08	1.87	1.98	2.02	1.88	1.96	Kurang
10	Kab. Banyuwangi	2.22	2.05	1.93	2.03	1.13	1.87	Kurang
11	Kota Mojokerto	1.93	2.16	1.77	1.68	1.25	1.76	Kurang
12	Kota Batu	1.63	1.95	1.50	1.84	1.81	1.75	Kurang
13	Kab. Gresik	1.63	1.96	2.09	2.03	1.00	1.74	Kurang
14	Kab. Pamekasan	1.50	2.15	1.61	2.00	1.38	1.73	Kurang
15	Kab. Probolinggo	1.53	2.20	1.71	1.78	1.06	1.66	Kurang
16	Kab. Blitar	1.94	1.95	1.75	1.56	1.06	1.65	Kurang
17	Kota Blitar	1.70	1.84	1.71	1.88	1.00	1.63	Kurang
18	Kota Kediri	1.34	1.75	1.61	1.84	1.44	1.60	Kurang
19	Kab. Nganjuk	1.22	2.05	1.71	1.63	1.31	1.58	Sangat Kurang
20	Kab. Kediri	1.38	2.20	1.14	1.48	1.55	1.55	Sangat Kurang
21	Kab. Pacitan	1.25	1.37	1.76	1.88	1.42	1.54	Sangat Kurang
22	Kab. Trenggalek	1.28	1.80	1.46	1.81	1.31	1.53	Sangat Kurang
23	Kab. Madiun	1.41	1.75	1.36	1.66	1.13	1.46	Sangat Kurang
24	Kab. Tuban	1.28	1.64	1.71	1.45	1.05	1.43	Sangat Kurang
25	Kab. Tulungagung	1.28	1.68	1.26	1.40	1.25	1.37	Sangat Kurang
26	Kab. Situbondo	1.25	2.00	1.24	1.33	1.00	1.36	Sangat Kurang
27	Kab. Ngawi	1.30	1.68	1.26	1.18	1.00	1.28	Sangat Kurang
	RATA-RATA	1.83	2.13	1.88	1.95	1.52	1.86	Kurang

Sumber : <http://pegi.layanan.go.id>

Dalam pelaksanaan Pegi telah ditentukan lima dimensi yang akan dikaji. Kelima dimensi tersebut adalah kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Masing-masing dimensi tersebut memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya penting, saling terkait dan saling menunjang satu dengan yang lainnya. Pada pemeringkatan Pegi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri menduduki peringkat ke-18 dengan nilai masing-masing dimensi yaitu : Kebijakan (1.34), Kelembagaan (1.75), Infrastruktur (1.61),

Aplikasi (1.84), Perencanaan (1.44) dengan hasil akhir dikategorikan kurang. Dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian *E-Government* di Kota Kediri jauh jika dibandingkan dengan Kota Surabaya yang berada di peringkat pertama.

Pemerintah Kota Kediri sejak tahun 2010 telah melakukan pengembangan berbagai aplikasi sistem manajemen keuangan dan pelayanan publik. Berbagai aplikasi sistem tersebut bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Kediri. Aplikasi sistem tersebut antara lain :

**Tabel 9. Aplikasi Sistem Pemerintah Kota Kediri**

No	Nama Aplikasi Sistem	Tahun
1.	Pengembangan website (portal) Pemerintah Daerah	2010
2.	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)	2011
3.	Sistem Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)	2011
4.	Sistem Informasi Manajemen Perencanaan (SIMPPD)	2013
5.	Sistem Pengadaan Barang & Jasa Secara Elektronik (SPSE)	2011

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Kediri Tahun 2015

Dalam keterkaitannya dengan permasalahan dalam proses perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Kediri sebagai aparatur perencana pembangunan, mngaplikasikan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja, memberikan kemudahan pada perencanaan dan konsolidasi data, memudahkan konsistensi pengelolaan data perencanaan dan anggaran. Penggunaan aplikasi sistem informasi

berbasis *online* ditujukan untuk membantu manajemen dalam pemerintahan untuk mengatur hal-hal yang dapat dilakukan secara komputerisasi. Hal tersebut didukung dengan adanya hasil wawancara dengan Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri sebagai berikut :

“ SIMPPD merupakan bagian dari SCBDP (*Sustainable Capacity Building Development Program*) dibangun antara tahun 2011-2012 dalam rangka untuk perbaikan sistem perencanaan. SIMPPD ini juga telah diatur dalam Perwal No.58 Tahun 2011. Kalau dulu teman-teman SKPD masih menyampaikan renja dalam bentuk excel, dimana kelemahannya bisa terjadi kekeliruan kode kemudian terkait dengan terjadinya kesalahan penjumlahan. Dua hal inilah yang sering terjadi, atas dasar itulah akhirnya kita menyusun sistem itu dalam rangka mengurangi kesalahan yang terjadi. Kedua untuk mempercepat proses, sehingga teman-teman SKPD tidak perlu mengirim softfile dalam bentuk excel, mereka langsung input dalam sistem secara online sehingga kita bisa langsung lihat. (Hasil wawancara dengan Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri pada tanggal 5 Januari 2018 pukul 11.30 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri).

Implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) telah diatur dan ditetapkan di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri pada tanggal 28 Desember 2011 yaitu Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 58 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD). Untuk mengetahui seberapa jauh implementasi Kebijakan tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) ini berhasil diterapkan oleh Barenlitbang dan SKPD terkait, penulis menggunakan teori dari George C. Edward III dengan empat indikator keberhasilan implementasi kebijakan publik sebagai berikut :

### a. Aspek Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada sasaran. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Dalam komunikasi yang terpenting ada akses informasi, pemerintah daerah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Penyebarluasan dimaksudkan agar sasaran dari kebijakan tersebut mengetahui peraturan-peraturan yang dikeluarkan dan mengerti/memahami isi serta maksud didalamnya.

Penyebarluasan peraturan daerah dapat dilakukan melalui media elektronik, atau media cetak di daerah bersangkutan serta melalui media komunikasi langsung. Menurut teori George C. Edward ada 3 sub komponen komunikasi yang mempengaruhi keefektifan penyampaian implementasi sebuah kebijakan yaitu Transmisi (*transmission*), kejelasan persoalan (*clarity*) dan konsistensi. Peneliti akan mengaitkan ketiga sub komponen tersebut dalam proses implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD), yaitu:

#### 1) Transmisi/Sosialisai (*Transmission*)

Dimensi transmisi/sosialisasi bertujuan agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Sosialisasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota

Kediri yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Kediri selaku pelaksana kebijakan. Penyampaian kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) dilakukan saat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan setiap bulan Januari. Hal tersebut diperkuat dengan wawancara berikut ini :

"... dari pihak Pemkot Kediri menyampaikan perwal no.58 tentang SIMPPD kepada Kepala Barenlitbang, kemudian diteruskan kepada Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dan dilimpahkan ke saya Kasubid perencanaan dan pendanaan. Kemudian dari sub bidang perencanaan dan pendanaan menyampaikan ke sasaran perwal tadi. Kita sosialisasikan secara langsung kepada sasaran perwal tadi awal tahun 2012 bulan Januari saat musrenbang tingkat kelurahan kepada SKPD, kecamatan, dan kelurahan. Penggunaan SIMPPD itu sendiri hanya dikalangan perangkat daerah di Kota Kediri, jadi tidak disosialisasikan kepada masyarakat luas. Dan secara rutin di tahun berikutnya, setiap bulan Januari atau Februari saat musrenbang kelurahan kita memberikan informasi apabila ada penambahan fitur atau perubahan di SIMPPD." (Hasil wawancara dengan Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri pada tanggal 5 Januari 2018 pukul 11.30 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri).

Kemudian peneliti juga mencoba menguji kebenaran dari hal yang telah diungkapkan oleh Kasubid Perencanaan dan Pendanaan tentang pelaksanaan sosialisasi perwal tersebut, diantaranya dengan menanyakan langsung kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan Kecamatan Kota Kediri melalui kutipan wawancara berikut :

" penyampaian SIMPPD pertama kali tahun 2012 dan seterusnya dilakukan setiap awal tahun saat bimtek atau musrenbang, karena setiap selesai musrenbang baik tingkat kelurahan hingga kota, kami diharuskan memasukkan hasil usulan-usulan yang sudah diprioritaskan kedalam website SIMPPD. Ada juga diskusi teknis sebelum diadakannya musrenbang yang hanya dihadiri admin atau user SIMPPD yang sudah ditunjuk untuk mengikuti bimtek dari barenlitbang." ( Hasil Wawancara dengan Ibu Erlisa Aduhai selaku Kasubag Perencanaan pada tanggal 5 Januari 2018 pukul 13.30 di Kantor Kecamatan Kota Kediri)

Berdasarkan hasil wawancara diatas serta temuan-temuan peneliti dilapangan dapat diketahui bahwa Barenlitbang sebagai pelaksana kebijakan telah memberikan sosialisasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) kepada sasaran kebijakan. Dalam hal ini Barenlitbang menyampaikan kebijakan tersebut dalam diskusi, pertemuan-pertemuan, bimbingan teknis dan musrenbang yang diadakan setiap tahun. Sehingga seluruh sasaran pelaksana dapat mengetahui kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD).

Berikut beberapa dokumentasi foto penyampaian sosialisasi kebijakan SIMPPD yang dilakukan oleh Barenlitbang Kota Kediri.



**Gambar 7. Kegiatan Sosialisasi SIMPPD dan Musrenbang Tingkat Kelurahan Kota Kediri**

*Sumber : Barenlitbang Kota Kediri*

Sosialisasi kebijakan SIMPPD tidak bersifat umum, artinya tidak disebarluaskan untuk masyarakat dengan sasaran kelompok tujuan sosialisasi ini hanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kecamatan dan kelurahan di Kota Kediri. Barenlitbang sebagai pelaksana kebijakan secara rutin mengadakan

pertemuan untuk menyampaikan kebijakan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi transmisi/sosialisasi kebijakan tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) telah disampaikan dengan cukup baik.

## 2) Kejelasan (*Clarity*)

Dimensi kejelasan komunikasi merupakan hal yang penting karena dengan kejelasan komunikasi diharapkan tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan masyarakat. Hasil wawancara dengan salah satu perangkat daerah di Kota Kediri, yaitu Bapak Ubaidillah Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum menyebutkan bahwa kejelasan informasi yang diberikan oleh Barenlitbang sudah cukup jelas baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini dapat terlihat dari wawancara berikut :

“Sudah cukup jelas dek. kita tidak cuma membaca perwal nya saja, tapi dari barenlitbang juga menyampaikan secara langsung. Jadi, ya kalau kami merasa ada yang kurang jelas biasanya langsung kami tanyakan ke Barenlitbang. Secara rutin setiap tahun pasti kita dipanggil barenlitbang untuk membahas SIMPPD jika ada perubahan atau penambahan fitur". (Hasil wawancara dengan Bapak Ubaidillah Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas PU Kota Kediri pada tanggal 6 januari 2018 pukul 13.00 di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri)"

Kemudian pendapat tersebut juga didukung oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Kecamatan Kota Kediri melalui kutipan wawancara berikut :

“Kalau dari SIMPPD nya saya sudah cukup jelas. dan ini sebentar lagi ada musrenbang kelurahan, kami pasti dipanggil barenlitbang lagi untuk persiapan musrenbang kelurahan. Karena SIMPPD ini sudah dilaksanakan mulai dari tahun 2012, jadi tidak ada alasan kami tidak mengerti tentang SIMPPD ini dek. InsyaAllah teman-teman dari bagian perencanaan sudah paham betul mengenai proses dan penggunaannya." ( Hasil Wawancara dengan Ibu Erlisa Aduhai selaku Kasubag Perencanaan pada tanggal 5 januari 2018 pukul 13.30 di Kantor Kecamatan Kota Kediri)

Dapat disimpulkan bahwa kejelasan penyampaian kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) sudah cukup jelas. Sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh Barenlitbang Kota Kediri tentang kebijakan SIMPPD lebih efektif dilakukan secara langsung terhadap sasaran kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran kebijakan bisa berdiskusi secara langsung terkait isi kebijakan yang belum dimengerti.

### 3) **Konsistensi** (*Consistecy*)

Dimensi konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, dan sasaran kelompok tujuan. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas, jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Konsistensi kebijakan implementasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) dinilai sudah cukup konsisten. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri yaitu :

“Dengan munculnya perwal no.58 tahun 2011 tentang SIMPPD, untuk mempermudah kinerja Barenlitbang dalam menyusun dokumen perencanaan, Pemerintah Kota Kediri juga membuat perwal no.51 tahun 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang, dan di dalam perwal baru tersebut sudah dicantumkan terkait penggunaan SIMPPD. Jadi, kita rasa pemerintah Kota Kediri sudah cukup konsisten dalam mengimplementasikan SIMPPD di Kota Kediri. (Hasil wawancara dengan Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri pada tanggal 5 Januari 2018 pukul 11.30 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Kediri mendukung kebijakan SIMPPD dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Kediri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Kota Kediri dimana pada poin Pelaporan Pelaksanaan Musrenbang, hasil musrenbang harus diinput kedalam SIMPPD. Perwal tersebut dapat dilihat pada gambar 8 berikut :

**F. Pelaporan**

1. Ketua Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan melaporkan Hasil Musrenbang kepada Camat
2. Hasil Musrenbang Kecamatan diinput pada Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan yang telah ditandatangani, disampaikan Camat kepada Bappeda Kota Kediri paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

**G. Waktu Pelaksanaan**

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada bulan Pebruari.

**Gambar 8. Penerapan SIMPPD dalam Petunjuk Teknis Musrenbang Kota Kediri**

*Sumber : Perwal Kota Kediri No.51 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Kota Kediri*

Hasil wawancara peneliti diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Kediri sebagai pembuat kebijakan SIMPPD sudah cukup konsisten dengan mengeluarkan peraturan walikota terkait petunjuk teknis penerapannya dalam musrenbang. Dengan adanya peraturan tersebut membuat penerapan SIMPPD tidak membingungkan Barenlitbang Kota Kediri sebagai pelaksana Kediri dalam

mengimplementasikannya. Sehingga Barenlitbang dapat lebih mudah dalam menyampaikan dan mengimplementasikannya sesuai dengan tujuan yang disepakati.

#### **b. Aspek Sumber Daya**

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan bagaimanapun jelas dan konsistensi ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia (*staff*), informasi dan wewenang (*information and authority*), fasilitas (*facility*), dan anggaran (*budgetary*) yang dijelaskan sebagai berikut :

##### **1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)**

Sumber daya manusia berkaitan dengan staf atau aparat pelaksana apakah sudah cukup tersedia atau perlu adanya penambahan staf implementor kebijakan. Ketersediaan jumlah staf yang cukup menjadi faktor penentu suatu kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompetensi di bidangnya. Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Kediri dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 10. Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Kediri Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH (ORANG)
		SD	SLTP	SLTA	D1	D3	S1	S2	S3	
1.	Struktural									
	4) Eselon II	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	5) Eselon III	-	-	-	-	-	-	5	-	5
	6) Eselon IV	-	-	-	-	-	1	10	-	11
2.	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Staff PNS	-	1	-	1	1	28	-	-	31
4.	Honorar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH :</b>		-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>16</b>		<b>48</b>

Sumber : Renstra Barenlitbang Tahun 2014-2019

Daftar jumlah pegawai diatas tidak seluruhnya terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD). Hanya beberapa pegawai dari Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Evaluasi yang menjadi tim pelaksana dan terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan SIMPPD. Tim pelaksana implementasi kebijakan SIMPPD dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 11. Tim Pelaksana Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan (SIMPPD) Kota Kediri**

No.	Nama	Jabatan	Tugas dan Wewenang
1.	Bambang Kautaman S.E	Super Admin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menentukan hak akses dari seluruh perangkat dari terhadap menu input renja;</li> <li>Menenambah , mengedit user beserta hak nya;</li> <li>melakukan transfer data dari renja ke rka</li> </ul>

No.	Nama	Jabatan	Tugas dan Wewenang
2.	Arif Nurhadi Santoso S.E	Administrator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan administrasi terhadap data referensi: data program, data kegiatan, dll</li> <li>• Melakukan adminstriasi terhadap data perangkat daerah</li> </ul>
3.	Staf Rendalev	Verifikator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memverifikasi usulan musrenbang;</li> <li>• Memetakan usulan musrenbang;</li> <li>• Memverifikadi renja perangkat daerah</li> </ul>

*Sumber : Olahan Penulis*

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa dengan jumlah tim pelaksana sebanyak 3 orang, yang terdiri dari satu (1) super admin, satu (1) administrator, dan staf rendalev sebagai verifikator, seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri :

Jumlah pegawai yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan SIMPPD kurang lebih tiga (3) orang termasuk saya, padahal tugas pokok kita ada banyak, dengan hanya staf yang berjumlah 3 orang kita menangani kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan daerah tahunan, menengah dan jangka panjang, apalagi beberapa bulan lagi ada 1 orang sudah akan purna.(Hasil wawancara dengan Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri pada tanggal 5 Januari 2018 pukul 11.30 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri).

Sedangkan, dalam hasil wawancara penulis dengan salah satu sasaran implementasi SIMPPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum:

“Kalau ditanya apa sumber daya di Dinas PU sendiri terkait SIMPPD kurang atau tidak, ya kurang dek. Jadi, setiap masing-masing SKPD itu hanya ditunjuk 1 atau 2 orang sebagai operatornya. Jadi, kalau operator tadi berhalangan atau ada kegiatan dinas di luar ya mau tidak mau kita harus cari penggantinya. Dan belum tentu penggantinya itu mengerti tentang SIMPPD. (Hasil wawancara dengan Bapak Ubaidillah Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas PU Kota Kediri pada tanggal 6 januari 2018 pukul 13.00 di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri)”

Dapat disimpulkan bahwa jumlah sumber daya manusia yang ada dalam mengimplementasikan kebijakan SIMPPD dinilai masih kurang. Selain keterbatasan sumber daya manusia/staff jumlah beban kerja juga banyak, sehingga diperlukan upaya pengoptimalan kinerja staf untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada, tetapi upaya ini dinilai kurang maksimal, karena membebani pekerjaan di luar kemampuan dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif. Namun jumlah staf yang memadai belum menjamin keberhasilan implementasi suatu kebijakan, staf harus mempunyai ketrampilan dan kompetensi dibidangnya masing-masing. Sedangkan, tim pelaksana tidak memiliki latar belakang atau kompetensi sesuai dengan kebijakan yang harus diimplementasikan.

## **2) Informasi dan Wewenang (*Information and Authority*)**

Sumber daya informasi dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Kediri yang kemudian diturunkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan (Barenlitbang) Kota Kediri. Sumber daya informasi dalam pelaksanaan SIMPPD dilihat dari informasi tentang bagaimana cara melaksanakan kebijakan dan informasi tentang kepatuhan para

pelaksana dan sasaran terhadap kebijakan yang telah ditetapkan , hal ini didukung hasil wawancara dengan Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri :

“Informasi gambaran umum penggunaan SIMPPD saya rasa sudah jelas dek, bisa dilihat di Perwal No.58 Tahun 2011. Dan untuk detail teknisnya sudah kami sampaikan setiap awal tahun saat musrenbang. Kami juga sudah memberikan user manual book terkait proses input datanya. Sedangkan petunjuk teknis terkait penggunaan SIMPPD saat musrenbang bisa dilihat di Perwal No.51 Tahun 2015. (Hasil wawancara dengan Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri pada tanggal 5 Januari 2018 pukul 11.30 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa informasi dalam implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) sudah cukup memadai sebagai bahan acuan pelaksanaan kebijakan. Informasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan SIMPPD yaitu informasi bagaimana maksud dan tujuan, informasi tentang bagaimana melaksanakannya, serta tentang koordinasi antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan. Informasi tentang kebijakan harus jelas sehingga pelaksana kebijakan tahu apa yang akan mereka lakukan.

Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewenangan ini menjadi penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Dalam hasil wawancara dengan Bapak Arif Nurhadi

Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri dia menjelaskan bahwa:

“Wewenang kita dari sub bidang perencanaan dan pendanaan terkait implementasi SIMPPD sebagai koordinator atau user tertinggi yang mengatur keseluruhan data yang masuk ke dalam aplikasi setelah musrenbang dilaksanakan. Tapi, dalam persiapan dan pelaksanaan musrenbang kita dibantu staff dari bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi karena untuk mengadakan musrenbang tidak bisa hanya dari sub bidang kita saja. Kita juga yang menyediakan materi-materi untuk disosialisasikan ke peserta musrenban”. (Hasil wawancara dengan Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri pada tanggal 5 Januari 2018 pukul 11.30 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri).

Hal ini juga didukung dengan data dari Barenlitbang Kota Kediri terkait jenis User/Pengguna dalam sistem SIMPPD dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 12. Jenis User/Pengguna dalam Sistem SIMPPD Kota Kediri**

No.	User/Pengguna	Hak dan Wewenang
1.	Kelurahan	Setiap kelurahan dari setiap kecamatan di Kota Kediri akan memiliki username dan password yang nantinya akan digunakan untuk mengakses Aplikasi.
2.	Kecamatan	Kecamatan di Kota Kediri akan diberikan hak akses untuk menggunakan Aplikasi.
3.	SKPD	Setiap SKPD di Kota Kediri diberikan hak akses untuk menggunakan Aplikasi.
4.	BAPPEDA	Bappeda adalah user dengan tingkatan tertinggi, karena Bappeda akan mengatur secara keseluruhan dari Aplikasi.

Sumber : Olahan Penulis

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui sumber daya informasi dan kewenangan sangat jelas diatur oleh Barenlitbang Kota Kediri sebagai *user* tertinggi. Sedangkan kelurahan, kecamatan dan SKPD bertindak sebagai *user* yang hanya memiliki hak akses memasukkan data. Jadi, keberadaan sumber daya informasi dan kewenangan yang sangat jelas menjadikan kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

### 3) Fasilitas (*Facility*)

Sumber daya fasilitas sarana dan prasarana dalam sebuah implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk mempermudah implementor dalam menjalankan sebuah kebijakan. Dengan adanya fasilitas yang baik maka akan menunjang keberhasilan kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam wawancara dengan Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri, dijelaskan bahwa:

“Fasilitas pendukung pelaksanaan SIMPPD di Barenlitbang kita cuma membutuhkan komputer PC atau laptop dan jaringan internet. Tapi kita lebih sering menggunakan laptop karena spesifikasinya lebih tinggi daripada komputer kantor. Kita juga ada LCD Proyektor untuk memberikan materi. Kita tidak memberikan kriteria khusus kepada kelurahan, kecamatan atau SKPD terkait sarana pendukungnya, karena setiap kantor sekarang pasti tersedia komputer dan jaringan. Jadi kita serahkan kepada perangkat daerah untuk menyediakannya. (Hasil wawancara dengan Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri pada tanggal 5 Januari 2018 pukul 11.30 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri).

Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa sarana pendukung utama SIMPPD cukup sederhana hanya berupa perangkat *hardware* yaitu komputer dan jaringan internet. Barenlitbang selaku pelaksana kebijakan tidak memberikan fasilitas tersebut dikarenakan setiap kantor kelurahan, kecamatan dan SKPD telah memiliki perangkat komputer dan jaringan internet sendiri. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang tercapainya tujuan kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) sangatlah penting. Fasilitas dalam mengimplementasikan kebijakan SIMPPD berupa perangkat *hardware* dan *software*. Pengadaan fasilitas yang layak akan menunjang dalam keberhasilan kebijakan. Fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di Barenlitbang Kota Kediri, yaitu :

**Tabel 13. Daftar Sarana dan Prasarana di Barenlitbang Kota Kediri**

No.	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
1.	Bangunan gedung (lokal)	1 unit	1 unit	-
2.	Kendaraan dinas :			
	- Roda empat	2 unit	2 unit	-
	- Roda dua	12 unit	12 unit	-
3.	Meja Rapat	4 buah	4 buah	-
4.	Sofa tamu	9 buah	9 buah	-
5.	Kursi kerja eselon	1 buah	1 buah	-
6.	Meja kerja eselon	1 buah	1 buah	-
7.	Kursi	145 buah	145 buah	-
8.	AC	13 unit	13 unit	-
9.	Rak Buku Citra Alumunium	7 buah	7 buah	-
10.	Hanycam	3 buah	3 buah	-
11.	Telepon	8 buah	8 buah	-
12.	Tape/radio tens	1 unit	1 unit	-
13.	Aipun Shiba	5 unit	5 unit	-
14.	Papan Organisasi	1 unit	1 unit	-
15.	Lemari	38 unit	38 unit	-

No.	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
16.	Filling	23 unit	23 unit	-
17.	Laptop/notebook	14 unit	14 unit	-
18.	Kamera Digital	6 buah	6 buah	-
19.	Kipas	3 unit	3 unit	-
20.	Jam dinding	5 buah	5 buah	-
21.	UPS	4 unit	4 unit	-
22.	Gambar Garuda Kaca	1 unit	1 unit	-
23.	Gambar Pres & Wapres kaca	1 unit	1 unit	-
24.	Meja Rapat Kayu	3 unit	3 unit	-
25.	Meja Kerja	68 buah	68 buah	-
26.	Peta Pembangunan	1 unit	1 unit	-
27.	Kursi lipat elephan besi	62 buah	62 buah	-
28.	Brankas	10 buah	10 buah	-
29.	Komputer PC	20 unit	20 unit	-
30.	PC Internal	1 unit	1 unit	-
31.	HD External	1 buah	1 buah	-
32.	Printer	30 unit	30 unit	-
33.	Televisi	3 unit	3 unit	-
34.	Meja Telepon	1 buah	1 buah	-
35.	Rak Kayu	2 buah	2 buah	-
36.	Rak Besi	3 buah	3 buah	-
37.	Meja komputer kayu	12 buah	12 buah	-
38.	LCD Proyektor	2 unit	2 unit	-
39.	Layar OHP	3 buah	3 buah	-
40.	Mesin ketik olivetti	4 unit	4 unit	-
41.	Mesin ketik	1 unit	1 unit	-
42.	Monitor	5 unit	5 unit	-
43.	CPU	3 unit	3 unit	-
44.	Scaner	2 unit	2 unit	-
45.	Jaringan	2 unit	2 unit	-
46.	Tangga aluminium	1 unit	1 unit	-
47.	Lemari es	1 unit	1 unit	-
48.	Korden	1 paket	1 paket	-
49.	Rel korden	1 unit	1 unit	-
50.	Partisi	5 paket	5 paket	-

Sumber : Renstra Barenlitbang Kota Kediri Tahun 2014-2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa fasilitas sarana dan prasarana di Barenlitbang Kota Kediri sudah lengkap dengan tersedianya komputer PC sebanyak 20 buah, laptop 14 buah dan jaringan internet sebanyak 2 buah.

Spesifikasi hardware minimum yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD), yaitu :

- a) 1 buah PC/Laptop
- b) Intel (R) Pentium (R) Dual Core
- c) Memory 512 MB RAM
- d) Mouse dan Keyboard

Berikut beberapa dokumentasi foto fasilitas yang terdapat di kantor Barenlitbang Kota Kediri, sebagai berikut:



**Gambar 9. Fasilitas di Barenlitbang Kota Kediri**

*Sumber : Olahan Peneliti*

Sedangkan software yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi SIMPPD ini hanya sebuah *browser* dengan fitur tambahan yakni Flash Plugins. Fitur Flash Plugins sudah terinstall hampir di semua perangkat PC atau laptop, apabila di perangkat PC atau laptop masih belum terinstall fitur Flash Plugins bisa langsung download di internet atau langsung meminta kepada Barenlitbang. Sebagai

perbandingan peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Erlisa Aduhai selaku Kasubag Perencanaan Kecamatan Kota, sebagai berikut :

“Untuk fasilitas penunjang SIMPPD disediakan dari kantor kecamatan sendiri dek. Kami cuma menyediakan laptop dan jaringan internet saja ... hanya saja kendalanya ada di internetnya. Biasanya saat pagi jaringannya banyak teman-teman yang pakai atau dari masyarakat yang ada keperluan disini, jadi biasanya kami sore baru upload datanya. Tapi ini juga tidak setiap hari, jadi kami tidak mempermasalahkannya. (Hasil Wawancara dengan Ibu Erlisa Aduhai selaku Kasubag Perencanaan pada tanggal 5 januari 2018 pukul 13.30 di Kantor Kecamatan Kota Kediri)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa fasilitas untuk melaksanakan kebijakan penggunaan SIMPPD merupakan salah satu hal penting untuk menunjang keberhasilan kebijakan SIMPPD. Fasilitas yang dimaksud cukup memadai untuk menunjang keberhasilan kebijakan ini yakni fasilitas pendukung penggunaan aplikasi SIMPPD secara *online* yaitu perangkat PC atau laptop dan jaringan internet. Jadi, sumber daya fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran implementasi kebijakan SIMPPD di Kota Kediri dinilai cukup memadai.

#### **4) Anggaran (*Budgetary*)**

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sementara itu dalam mengimplementasikan kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) anggaran diperoleh dari APBD Kota Kediri. Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Arif

Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota

Kediri :

"Segala bentuk pembiayaan dari kebijakan SIMPPD ini dibebankan pada APBD dek. Pembiayaan tersebut terdiri dari pembuatan, perawatan dan pengembangan sistem. Untuk nominal setiap tahunnya berubah-ubah dek. Tergantung kebutuhan apakah ada penambahan fitur baru atau tidak" (Hasil wawancara dengan Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri pada tanggal 5 Januari 2018 pukul 11.30 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri).

Berdasarkan wawancara tersebut anggaran dari implementasi kebijakan dibebankan pada APBD Kota Kediri. Anggaran yang dikeluarkan setiap tahunnya digunakan untuk melakukan pendampingan dan pengembangan SIMPPD. Anggaran pengembangan SIMPPD tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 14. Anggaran Perawatan dan Pengembangan SIMPPD Kota Kediri  
Tahun 2012-2016**

Program dan Kegiatan	Anggaran (Tahun)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pengembangan dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD)	Rp.50.000.000	Rp.100.000.000	Rp.75.000.000	Rp.135.000.000	Rp.100.000.000

*Sumber : Olahan Penulis*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui apabila anggaran untuk pengembangan aplikasi SIMPPD berkisar antara 50-100 juta rupiah. Sedangkan, pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp.135.000.000 dikarenakan aplikasi SIMPPD mengalami penambahan fitur berupa terintergrasinya sistem data SIMPPD dengan aplikasi lainnya yaitu SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Keuangan. Dapat disimpulkan tidak ada masalah terkait anggaran dalam melaksanakan kebijakan SIMPPD di Kota Kediri.

### **c. Aspek Disposisi**

Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemauan untuk melakukan kebijakan tersebut. Mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan itu. Disposisi ini merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana kebijakan. Disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Untuk mengetahui seberapa tinggi aspek disposisi yang dimiliki pelaksana kebijakan, dapat diketahui dari dua (2) indikator berikut :

#### **1) Pengetahuan Terhadap Kebijakan**

Pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu kebijakan adalah sangat penting. Implementasi kebijakan yang berhasil bisa gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya mengerti dan memahami tentang kebijakan tersebut. Barenlitbang sebagai pelaksana kebijakan Sistem Informasi Manajemen

Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) harus mengetahui maksud umum dari standar dan tujuan kebijakan itu. Dalam sebuah kesempatan wawancara dengan dengan Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri, beliau mengatakan:

“SIMPPD berbeda dengan sistem lain yang dipublish, sehingga proses penggunaannya hanya dikalangan SKPD sehingga tidak ditunjukkan, sebagai kebutuhan internal pemerintah. sehingga tidak perlu interaksi dari masyarakat. Secara umum SIMPPD sudah dijelaskan cukup detail di Perwal Kota Kediri No.58 Tahun 2011 tentang SIMPPD, seperti tujuan dan sasaran dari kebijakan itu. Secara khusus kita telah membuat pedomannya di manual book SIMPPD . Manual Book tadi sudah cukup mampu menjelaskan seluk beluk aplikasi SIMPPD. Jadi kita sudah memahami tentang cara menggunakannya. (Hasil wawancara dengan Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri pada tanggal 5 Januari 2018 pukul 11.30 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Barenlitbang dalam melaksanakan kebijakan SIMPPD di Kota Kediri berpedoman pada Perwal Kota Kediri No.58 Tahun 2011 tentang SIMPPD dan manual book SIMPPD. Peraturan Walikota dan manual book tersebut dinilai telah memberikan informasi mengenai tujuan, maksud, sasaran dan bagaimana mengimplementasikannya.

## **2) Respon Terhadap Kebijakan**

Arah respon pelaksana terhadap kebijakan juga merupakan hal yang penting. Apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau respon yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Dari

penelitian yang didapatkan, sikap atau respon dari pelaksana kebijakan yaitu Barenlitbang Kota Kediri cukup baik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri, beliau mengatakan:

“Barenlitbang Kota Kediri menerima dan mendukung kebijakan penggunaan aplikasi SIMPPD terkait hal pembuatan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini juga memberikan kemudahan bagi kami untuk menyusun dokumen perencanaan yang tersusun secara sistematis. Teman-teman SKPD, kelurahan dan kecamatan juga menerima kebijakan SIMPPD ini. Mereka menilai penggunaan SIMPPD ini jauh lebih efektif dan efisien daripada cara lama yang harus mereka print out kemudian diserahkan ke kami. Ini lebih hemat waktu dan tenaga". (Hasil wawancara dengan Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri pada tanggal 5 Januari 2018 pukul 11.30 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, sikap pelaksanaan dalam implementasi terhadap Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) ditanggapi cukup baik. Dalam hal ini pelaksana kebijakan SIMPPD menjalankan tugas dan tanggung jawab seperti yang diharapkan sesuai dengan instruksi dari pembuat kebijakan. Karena ketika pelaksana memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

#### **d. Aspek Struktur Birokrasi**

Aspek Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Element pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart*

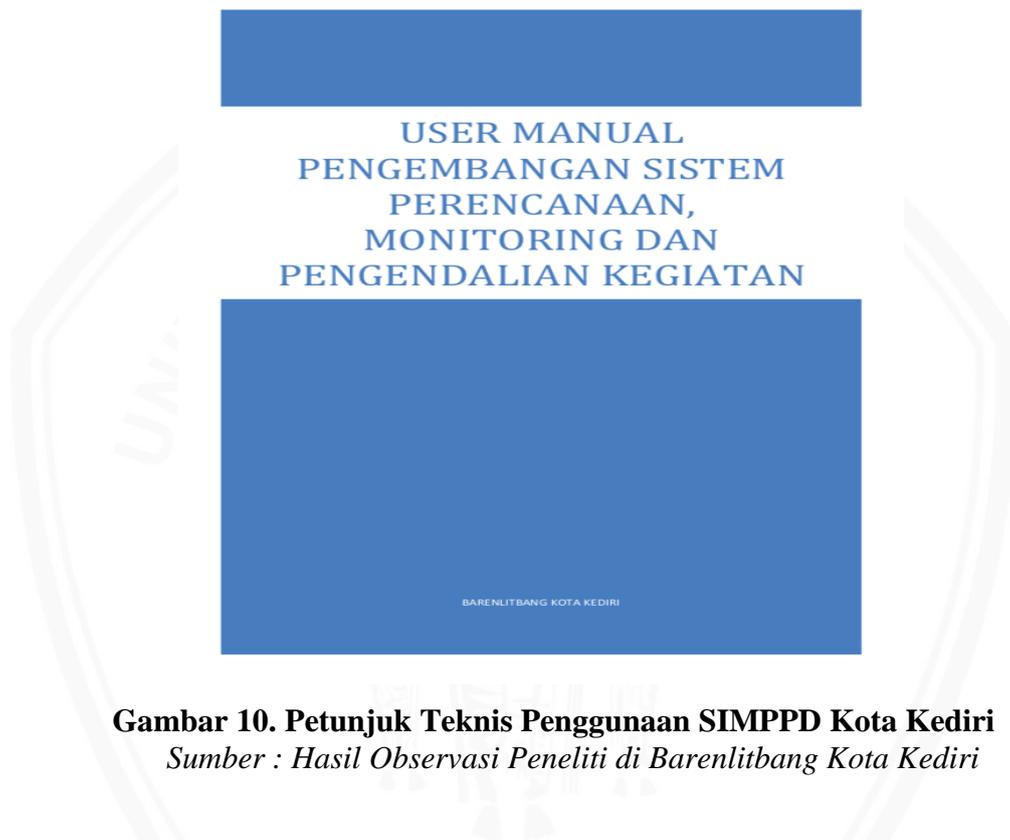
*Operational Procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Elemen kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

### **1) *Standart Operational Procedure* (SOP)**

Bagian yang terpenting dalam implementasi kebijakan adalah adanya SOP. Kegunaan SOP merupakan suatu pedoman tertulis yang digunakan untuk menggerakkan pelaksana dalam pembagian tugas agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif sehingga tujuan yang ditetapkan dapat terealisasi. Dari hasil penelitian dilapangan Barenlitbang memiliki SOP berupa petunjuk pengaplikasian SIMPPD dalam bentuk user manual book. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri, yaitu:

“SOP kita menggunakan manual book yang sudah kita buat mengenai petunjuk penggunaan SIMPPD. Buku petunjuk teknis ini juga sudah kita berikan kepada teman-teman SKPD , kelurahan dan kecamatan saat musrenbang kelurahan setiap awal tahunnya. SOP ini juga mudah dipahami, dan apabila ada teman-teman yang tidak mengerti mereka langsung menanyakannya pada kita. Kita juga memiliki grup chat WA dengan anggota teman-teman SKPD untuk bertanya atau sharing untuk perbaikan SIMPPD. (Hasil wawancara dengan Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri pada tanggal 5 Januari 2018 pukul 11.30 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui apabila Barenlitbang telah memiliki SOP berupa buku petunjuk teknis penggunaan SIMPPD. Sosialisasi demi memberikan pengetahuan kepada sasaran kebijakan mengenai SOP petunjuk penggunaan SIMPPD sudah diberikan. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya SOP atau petunjuk teknis SIMPPD pada gambar 10. berikut:



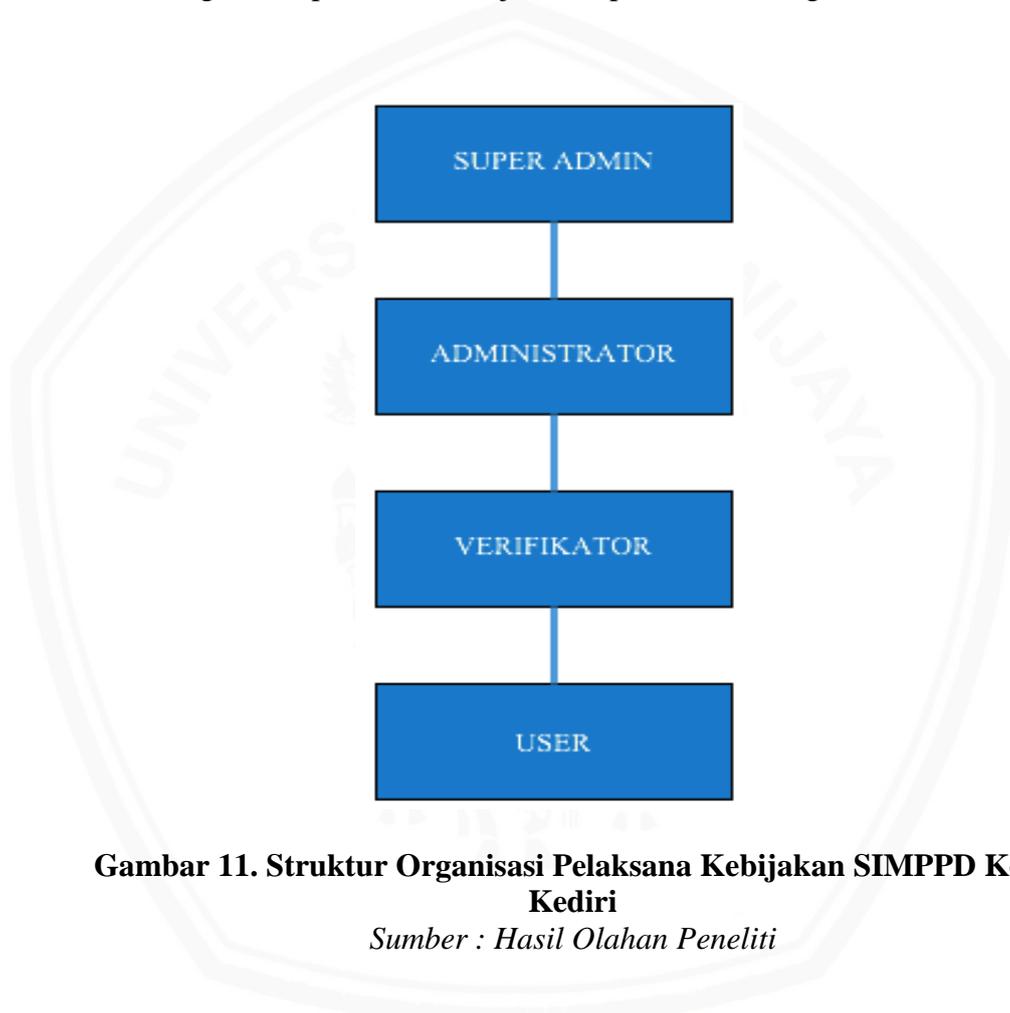
**Gambar 10. Petunjuk Teknis Penggunaan SIMPPD Kota Kediri**  
*Sumber : Hasil Observasi Peneliti di Barenlitbang Kota Kediri*

Gambar diatas menunjukkan adanya SOP atau petunjuk teknis sebagai pedoman implementor dalam melaksanakan kebijakan SIMPPD. Pelaksanaan Kebijakan SIMPPD pada pemerintahan Kota Kediri telah diatur dalam prosedur-prosedur dasar kerja yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan adanya prosedur-prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

## 2) Fragmentasi

Struktur Organisasi pada Barenlitbang Kota Kediri pada gambar 10 menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

Struktur organisasi pelaksana kebijakan dapat dilihat dari gambar berikut:



**Gambar 11. Struktur Organisasi Pelaksana Kebijakan SIMPPD Kota Kediri**

*Sumber : Hasil Olahan Peneliti*

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa tim pelaksana kebijakan dari Barenlitbang memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda. Sasaran kebijakan yaitu kelurahan, kecamatan dan SKPD bertindak sebagai *user* menginput data kedalam SIMPPD, kemudian verifikator memverifikasi data yang masuk tersebut, administrator bertugas untuk memeriksa data dan mengirimkannya

kepada super admin. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri, beliau menjelaskan:

“Dari pihak Pemkot Kediri menyampaikan perwal no.58 tentang SIMPPD kepada Kepala Barenlitbang, kemudian diteruskan kepada Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi sebagai super admin dan dilimpahkan ke saya Kasubid perencanaan dan pendanaan sebagai administrator. Kemudian dari sub bidang perencanaan dan pendanaan menyampaikan ke sasaran perwal atau user. (Hasil wawancara dengan Bapak Arif Nurhadi Santoso selaku Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri pada tanggal 5 Januari 2018 pukul 11.30 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri).

Pemerintah Kota Kediri melimpahkan tugas untuk melaksanakan kebijakan SIMPPD kepada Barenlitbang Kota Kediri, kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dan dilimpahkan kepada sub bidang perencanaan dan pendanaan. Sub bidang perencanaan dan pendanaan kemudian menyampaikan kebijakan Peraturan Walikota Kediri No.58 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah kepada sasaran kebijakan. Sedangkan, untuk sasaran kebijakan SIMPPD yaitu pihak kelurahan, kecamatan dan SKPD bertugas untuk menyampaikannya ke pegawai dikalangan instansi mereka.

Kemudian pendapat itu juga didukung oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Kecamatan Kota Kediri melalui kutipan wawancara berikut :

“Barenlitbang memberikan sosialisasi terkait perwal no.58 tahun 2011 saat musrenbang tingkat kelurahan dan untuk detailnya terkait penggunaan SIMPPD secara teknis disampaikan saat bimbingan teknis yang difasilitasi barenlitbang. Kemudian barenlitbang memberi arahan untuk menunjuk satu atau dua orang dari kecamatan sebagai admin atau usernya. Adminnya harusnya dari bagian perencanaan tapi dilimpahkan kepada staf lain. Tidak

ada syarat khusus buat menjadi adminnya dek". (Hasil Wawancara dengan Ibu Erlisa Aduhai selaku Kasubag Perencanaan pada tanggal 5 Januari 2018 pukul 13.30 di Kantor Kecamatan Kota Kediri)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa proses struktur birokrasi yang berjalan di Barenlitbang Kota Kediri dalam mengimplementasikan kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) telah dilaksanakan dengan benar. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini. Tetapi walaupun masing-masing aparat pelaksana kebijakan mempunyai tugas masing-masing yang berbeda-beda, namun diperlukan koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan sehingga apa yang menjadi tujuan dari kebijakan SIMPPD dapat tercapai.

## **2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) pada Pemerintah Kota Kediri**

Dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan Barenlitbang Kota Kediri ditemukan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi yang dilihat dari empat aspek yaitu aspek komunikasi, aspek sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Melalui faktor pendukung dan penghambat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Barenlitbang untuk terus melakukan yang terbaik demi berhasilnya implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD). Empat

aspek yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi SIMPPD, antara lain :

**a. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan SIMPPD Kota Kediri adalah sebagai berikut :

**1) Komunikasi**

Hasil wawancara dengan beberapa narasumber menunjukkan bahwa komunikasi terkait implementasi kebijakan sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Sosialisasi atau penyuluhan secara langsung yang dilakukan oleh Barenlitbang Kota Kediri melalui pertemuan-pertemuan, bimbingan teknis dan diskusi dinilai cukup efektif untuk menyampaikan maksud dan tujuan implementasi SIMPPD di Kota Kediri. Sasaran Kebijakan juga dapat berdiskusi secara langsung, sehingga apa saja yang tidak mereka mengerti tentang kebijakan SIMPPD bisa langsung ditanyakan.

Penyampaian materi tentang implementasi dengan penyuluhan secara langsung dinilai sudah cukup jelas, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan sasaran kebijakan. Kemudian konsistensi komunikasi implementasi kebijakan SIMPPD dinilai sudah cukup jelas. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan haruslah konsisten dan jelas. Pelaksanaan kebijakan penggunaan SIMPPD dalam menyusun dokumen perencanaan yang akuntabel didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota No.51 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Musyawarah

Perencanaan di Kota Kediri, dimana SIMPPD digunakan dalam memberikan pelaporan hasil musrenbang.

## **2) Sumber Daya**

Dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber diketahui sumber daya informasi tentang bagaimana cara melaksanakan implementasi kebijakan SIMPPD sudah tertera secara jelas di dalam Peraturan Walikota Kediri No.58 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Pembangunan Daerah (SIMPPD) dan Peraturan Walikota Kediri No.51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Musyawarah Perencanaan Kota Kediri. Kualitas fasilitas sarana dan prasarana sudah baik dan sumber daya anggaran sudah mencukupi dikarenakan hanya perlu melakukan perawatan sistem secara berkala.

## **3) Disposisi**

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian di lapangan aspek disposisi menjadi salah satu faktor pendukung yang cukup penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Barenlitbang Kota Kediri sebagai pelaksana kebijakan sudah sepenuhnya mengerti dan memahami tentang kebijakan SIMPPD, sehingga mampu mengerti bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan yaitu Barenlitbang Kota Kediri dan sasaran kebijakan sangat mendukung adanya kebijakan SIMPPD. Dengan adanya dukungan yang baik dari pelaksana kebijakan maupun sasaran kebijakan diharapkan tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai.

#### 4) Struktur Organisasi

Struktur organisasi menjadi salah satu faktor pendukung yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap implementasi kebijakan SIMPPD. Salah satu aspek struktur birokrasi yaitu *Standart Operational Procedure* (SOP). Barenlitbang memiliki SOP atau pedoman petunjuk teknis SIMPPD sebagai acuan dalam implementasi kebijakan SIMPPD. Di dalam SOP tersebut terdapat penjelasan detail cara penggunaan SIMPPD dan dinilai sangat mudah dipahami. Aspek lainnya yaitu fragmentasi, fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab sebuah bidang kepada unit-unit organisasi. Fragmentasi yang dilakukan oleh Barenlitbang telah sesuai dengan peran dan tugas yang diberikan Pemerintah Kota Kediri.

##### b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan SIMPPD Kota Kediri adalah sebagai berikut:

##### 1) Sumber Daya Manusia

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan salah satu faktor yang mempengaruhi sebuah kebijakan dapat terlaksana dengan baik adalah sumber daya manusia. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan

kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Peneliti menganalisis secara kuantitas, ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki Barenlitbang khususnya pada Bidang Perencanaan dan Pendanaan dimana kebijakan SIMPPD dijalankan belum memadai dan kurang jumlahnya. Secara kuantitas jumlah pegawai kurang memadai sehingga secara kualitas pun juga masih dapat dikatakan masih kurang. Oleh karena itu, terbatasnya jumlah sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan dapat menghambat implementasi tersebut. Berikut faktor penghambat sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan SIMPPD, yaitu :

- a) Ketersediaan jumlah sumber daya manusia di Barenlitbang Kota Kediri belum memadai dan kurang jumlahnya.

Sumber daya manusia di Barenlitbang Kota Kediri masih kurang memadai. Kekurang seimbangan ini terutama terlihat pada bagian-bagian memegang peranan penting yaitu sebagai verifikator atau administrator dalam SIMPPD dibutuhkan jumlah pegawai yang mencukupi karena satu orang saja tidak bisa mengumpulkan dan memverifikasi seluruh data yang masuk dari berbagai SKPD. Kurangnya kemampuan sumber daya aparatur yang ada dalam menyusun perencanaan dan selanjutnya mengakibatkan kesulitan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

- b) Kualitas sumber daya manusia di Barenlitbang Kota Kediri yang masih rendah.

Kualitas sumber daya manusia yang rendah yang dimaksud disini

adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan bekal pelatihan dan pengalaman yang memadai. Dikarenakan jumlah ketersediaan sumber daya manusia di Barenlitbang Kota Kediri yang tidak memadai dan latar belakang pendidikan berbeda dengan kebutuhan kebijakan SIMPPD, sehingga secara pengalaman dan pelatihan terkait penggunaan teknologi informasi komunikasi masih kurang.

Kompetensi dapat diartikan sebagai ketepatan tugas dan fungsi pegawai dalam institusi, artinya semakin tepat penempatan pegawai pada tugas-tugas di sebuah instansi akan menentukan tingkat keberhasilan tugas yang diembannya. Tim pelaksana kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) hampir semua anggotanya tidak memiliki latar belakang bidang pendidikan khusus yang terkait dengan tugas yang diberikan kepada mereka. Sehingga, dapat diketahui tim pelaksana akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) dalam Penyusunan Dokumen Pembangunan yang Akuntabel**

Pada subpoint ini peneliti akan membahas terkait hasil penelitian mengenai Implementasi kebijakan tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) dengan studi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Kediri yang

terdapat pada subpoint sebelumnya dengan menyesuaikannya dengan teori-teori yang terdapat dalam model implementasi George C. Edward III. Adapun pembahasan terkait hasil tersebut adalah sebagai berikut :

**a. Aspek Komunikasi**

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula.

Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua pelaksana dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan dan jika dipaksakan maka tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor komunikasi yang terjadi pada implementasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD). Peneliti juga akan menjabarkannya

ke dalam 3 (tiga) indikator yang terdapat pada faktor komunikasi. Pembahasan mengenai faktor komunikasi tersebut adalah sebagai berikut :

**1) Transmisi (*Transmission*)**

Proses penyampaian informasi implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Kediri kemudian diteruskan kepada sasaran kebijakan yaitu kelurahan, kecamatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal tersebut dimaksudkan agar informasi yang diberikan dapat tersampaikan secara tepat kepada setiap sasaran kebijakan. Transmisi tersebut dilakukan pada saat bimbingan teknis (bimtek), musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan dan diskusi secara langsung yang difasilitasi oleh Barenlitbang.

Bimbingan teknis merupakan pemberitahuan secara langsung yang ditujukan untuk para sasaran kebijakan yang diselenggarakan setiap awal tahun sebelum musrenbang tingkat kelurahan dilaksanakan. Adanya bimbingan teknis tentang penggunaan aplikasi SIMPPD diharapkan para sasaran kebijakan atau peserta bimtek nantinya memiliki beberapa kompetensi. Salah satu kompetensi adalah mampu memahami dan menggunakan aplikasi *online* SIMPPD dengan lancar.

Setelah mengikuti bimbingan teknis, peserta bimbingan teknis tersebut bertugas untuk menjelaskan kepada rekan kerjanya di masing-masing kelurahan, kecamatan dan SKPD agar mereka yang belum mendapatkan bimbingan teknis

repository.ub.ac.id

dapat memahami inti dari kebijakan SIMPPD. Bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIMPPD dilakukan di Kota Kediri sendiri dengan difasilitasi dari Barenlitbang, bimbingan teknis tersebut dilakukan selama satu (1) hari sebelum musrenbang tingkat kelurahan diadakan. Namun, peserta yang dapat mengikuti bimbingan teknis tersebut hanya perwakilan dari masing-masing kelurahan, kecamatan dan SKPD yang ditunjuk sebagai user atau pengguna yang akan diberi hak akses untuk memasukkan data rencana pembangunan kedalam SIMPPD.

Dari pemaparan data dengan informan yang menyatakan bahwa transmisi dilakukan dengan penyuluhan secara langsung dinilai tepat, penyuluhan yang dilakukan oleh Barenlitbang Kota Kediri tentang Peraturan Walikota Kediri No.58 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) kepada kelurahan, kecamatan dan SKPD dilakukan pada saat musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan, bimbingan teknis dan diskusi secara langsung yang difasilitasi oleh Barenlitbang. Maka transmisi yang terjadi sesuai dengan ungkapan George C. Edward III, yang menyatakan bahwa kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan serta dengan penyampaian yang baik. Peneliti menyimpulkan bahwa pada indikator transmisi pada implementasi kebijakan tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) di Kota Kediri berjalan baik, karena informasi yang disampaikan oleh

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Barenlitbang Kota Kediri sudah tepat sasaran. Indikasi dari hal tersebut adalah kelurahan, kecamatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai sasaran kebijakan sudah mengetahui tentang kebijakan Peraturan Walikota Kediri No.58 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD).

## 2) Kejelasan (*Clarity*)

Berdasarkan data mengenai hasil indikator kejelasan komunikasi, terdapat dua metode penyuluhan yang dilakukan yaitu penyuluhan secara langsung dan penyuluhan tidak langsung yaitu melalui media elektronik. Dapat dilihat bahwa kejelasan Implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) sudah baik, hal ini karena para sasaran kebijakan sudah mengetahui adanya kebijakan tentang SIMPPD. Hal tersebut terjadi karena implementor sudah melakukan penyuluhan dalam bentuk rapat, workshop, diskusi, bimbingan teknis dan diaolog yang selama ini sudah dilakukan.

Penyampaian secara langsung ini dinilai cara yang sudah benar dengan melaksanakan sosialisasi yang diberikan langsung terhadap target atau sasaran kebijakan agar dengan adanya pemberitahuan secara langsung oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Kediri yang selama ini diselenggarakan, pegawai-pegawai di kelurahan, kecamatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat secara langsung bertanya tentang apa yang masih belum mereka pahami tentang kebijakan penggunaan SIMPPD.

Hal ini sesuai dengan argument George C. Edward III bahwa jika kebijakan-kebijakan dapat diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk- petunjuk pelaksanaannya tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas sampai kesasaran kebijakan. Peneliti menyimpulkan bahwa pada indikator kejelasan pada implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) di Kota Kediri sudah cukup baik, hal ini terlihat dari metode penyuluhan yang dilakukan rutin setiap awal tahun serta bimbingan teknis dan diskusi secara langsung di kantor Barenlitbang Kota Kediri sehingga sasaran kebijakan dapat sepenuhnya memahami kebijakan SIMPPD.

### **3) Konsistensi (*Consistency*)**

Kebijakan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) secara *online* merupakan langkah yang dipilih Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) dalam mempermudah proses penyusunan dokumen perencanaan daerah yang akuntabel. SIMPPD Kota Kediri sudah berjalan secara baik di Kota Kediri dan didukung dengan peran aktif dari pelaksana kebijakan maupun sasaran kebijakan. Konsistensi dalam implementasi kebijakan SIMPPD di Kota Kediri sudah berjalan berdasarkan penyuluhan yang dilakukan rutin setiap awal tahun serta bimbingan teknis dan diskusi secara langsung di kantor Barenlitbang Kota Kediri.

Konsistensi kebijakan SIMPPD di Kota Kediri juga diiringi dengan keluarnya Peraturan Walikota Kediri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Kota Kediri dimana pada poin pelaporan, hasil musrenbang diinput kedalam SIMPPD. Berdasarkan data terkait konsistensi komunikasi dalam implementasi kebijakan penggunaan SIMPPD, peneliti mengamati dapat dikatakan sudah baik karena perintah yang diberikan cukup konsisten dan tidak berubah-ubah. Kondisi yang terjadi sudah sesuai dengan ungkapan George C. Edward III yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan yang efektif, maka perintah-perintah harus konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan).

#### **b. Aspek Sumber Daya**

Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor Sumber daya yang terdapat dalam implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) di Kota Kediri, peneliti juga akan menjabarkan kedalam 4 (empat) indikator yang terdapat dalam faktor sumber daya. Empat indikator tersebut antara lain :

##### **1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)**

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan SIMPPD di Kota Kediri membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan, sumber daya manusia yang dimaksud adalah pegawai sub bidang perencanaan dan pendanaan Barenlitbang Kota Kediri.

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Peneliti menganalisis secara kuantitas, ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki Barenlitbang khususnya pada Bidang Perencanaan dan Pendanaan dimana kebijakan SIMPPD dijalankan belum memadai dan kurang jumlahnya. Sumber daya manusia (staff) yang dimiliki pelaksana kebijakan yaitu Bidang Perencanaan dan Pendanaan Barenlitbang Kota Kediri berjumlah tiga (3) orang, dengan masing-masing satu (1) super admin, administrator dan verifikator. Secara kuantitas dan kualitas jumlah pegawai kurang memadai sehingga secara kualitas pun juga masih dapat dikatakan masih kurang. Karena dalam

menganalisis data di dalam SIMPPD cukup banyak yang harus diperiksa, dengan terbatasnya dan sumber daya manusia maka akan menjadikan kualitas dokumen perencanaan pembangunan berkurang. Dalam pengawasan pun juga kurang maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, sehingga masih ada beberapa kesalahan data yang ada dibiarkan begitu saja. Hal ini tidak sesuai dengan ungkapan George C. Edward III bahwa jika kebijakan- kebijakan dapat diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, apabila memiliki kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan. Peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan SIMPPD dinilai masih kurang. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

## **2) Informasi dan Wewenang (*Information and Authority*)**

Menurut Edward III dalam Agustino (2006) informasi dalam implementasi kebijakan, mempunyai dua bentuk, yaitu yang pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakaan tersebut patuh terhadap hukum. Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan

cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Peneliti menganalisis bahwa informasi implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) sudah cukup memadai sebagai bahan pelaksanaan kebijakan. Informasi yang berkaitan tentang maksud dan tujuan kebijakan, serta sasaran kebijakan tertera dalam Peraturan Walikota Kediri No.58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD). Sedangkan petunjuk teknis penggunaan SIMPPD dapat diketahui dari *user manual book* yang dibuat oleh Barenlitbang dan teknis pelaporan SIMPPD saat musrenbang diadakan dapat dilihat pada Peraturan Walikota No.51 Tentang Petunjuk Teknis Musyawarah Pembangunan Kota Kediri. Informasi tentang kebijakan harus jelas, sehingga para pegawai pelaksana kebijakan tahu apa yang akan mereka lakukan dan tahu apakah masyarakat yang terlibat tahu tentang kebijakan ini.

Menurut Edward III dalam Agustino (2006) wewenang pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implemmentor di mata publik tidak legitimasi, sehingga dapat mengagalkan proses implementasi kebijakan, Tetapi dalam konteks yang lain ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan. Di satu pihak,

efektifitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain, efektifitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya atau demi kepentingan kelompoknya.

Berdasarkan hasil analisis peneliti diketahui bahwa Barenlitbang dalam melaksanakan implementasi kebijakan SIMPPD sebagai pelaksana kebijakan mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai kewenangan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan SIMPPD sub bidang perencanaan dan pendanaan dibantu dalam mempersiapkan dan melaksanakan musrenbang oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi. Sub bidang perencanaan dan pendanaan yang mendapat wewenang melaksanakan kebijakan SIMPPD sebagai user tertinggi dalam mengatur seluruh data yang masuk di dalam aplikasi, termasuk memberikan fasilitas berupa bimbingan teknis dan diskusi kepada sasaran kebijakan.

### **3) Fasilitas (*Facility*)**

Menurut Edward III dalam Agustino (2006), fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Fasilitas-fasilitas diperlukan untuk menterjemah usul-usul di atas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan. Fasilitas merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fasilitas dapat berupa kantor, alat/perengkapan, kendaraan. Fasilitas atau sarana dan prasarana

merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti dapat diketahui bahwa fasilitas yang digunakan oleh pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan SIMPPD sudah cukup memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas pendukung yang digunakan oleh Barenlitbang antara lain komputer PC, atau laptop, jaringan internet dan fasilitas pendukung lainnya seperti LCD proyektor. Oleh karena itu, fasilitas yang kurang memadai hanya akan menghambat implementasi sebuah keajaiban, maka perlu adanya perawatan secara berkala terhadap fasilitas-fasilitas tersebut.

#### **4) Anggaran (*Budgetary*)**

Suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik apabila tanpa dukungan sumber daya anggaran. Maka dari itu sumber daya anggaran menjadi salah satu faktor yang cukup penting demi berjalannya kebijakan ini dengan baik. Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atas suatu kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa anggaran implementasi kebijakan SIMPPD dibebankan pada APBD Kota Kediri. Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan perawatan dan pengembangan

fitur baru pada sistem aplikasi SIMPPD. Pada kebijakan SIMPPD ini anggaran yang didapatkan bisa dibilang cukup, karena hanya perlu melakukan perawatan sistem secara berkala.

### **c. Aspek Disposisi**

Pada pembahasan mengenai hasil dalam aspek disposisi yang terdapat dalam implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) di Kota Kediri, peneliti juga akan menjabarkan kedalam 2 (dua) indikator yang terdapat dalam aspek disposisi. Dua indikator tersebut antara lain :

#### **1) Pengetahuan Terhadap Kebijakan**

Menurut Edward III dalam Winarno (2006) disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya bisa tidak terjadi .

Pengetahuan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan SIMPPD sudah cukup baik. Hal ini dapat diketahui dari Barenlitbang Kota Kediri sebagai pelaksana kebijakan memiliki buku pedoman teknis tentang penggunaan aplikasi SIMPPD. Dalam pedoman tersebut berisi petunjuk-petunjuk teknis secara detail bagaimana cara memasukkan dan mengolah data yang ada untuk menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah. Peraturan Walikota Kediri No.58 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi

Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) berisi informasi terkait tujuan dan maksud kebijakan, manfaat serta pembiayaan untuk SIMPPD telah disosialisasikan oleh Barenlitbang Kota Kediri kepada sasaran kebijakan setiap awal tahun baik saat musrenbang tingkat kelurahan maupun saat bimbingan teknis sejak tahun 2012. Oleh karena itu, barenlitbang sebagai pelaksana kebijakan pasti mengerti tentang maksud dan tujuan serta penggunaannya dalam menyusun dokumen perencanaan yang akuntabel.

## **2) Respon Terhadap Kebijakan**

Menurut Edward III dalam Winarno (2006) kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-persepektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Respon atau sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Dari penelitian yang

didapatkan, sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan penggunaan SIMPPD di Kota Kediri cukup baik.

Respon atau sikap pelaksana kebijakan yaitu Barenlitbang Kota Kediri dalam melaksanakan kebijakan penggunaan SIMPPD sangat menerima dan mendukung penggunaan SIMPPD dalam membantu proses pembuatan dokumen perencanaan yang akuntabel. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Selain para aparat pelaksana kebijakan, kecenderungan sasaran kebijakan terhadap penggunaan SIMPPD juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan SIMPPD ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sasaran kebijakan yaitu kelurahan, kecamatan dan SKPD juga menerima kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan penggunaan aplikasi berbasis online SIMPPD di Kota Kediri dapat berjalan dengan baik karena mendapatkan dukungan baik dari pelaksana kebijakan maupun sasaran kebijakan.

#### **d. Aspek Struktur Birokrasi**

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang

mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor struktur birokrasi yang terdapat pada implementasi kebijakan SIMPPD di Kota Kediri, peneliti juga akan menjabarkannya kedalam 2 (dua) indikator yang terdapat pada faktor struktur birokrasi, pembahasan terkait faktor struktur birokrasi tersebut adalah sebagai berikut:

### 1) *Standart Operational Procedure (SOP)*

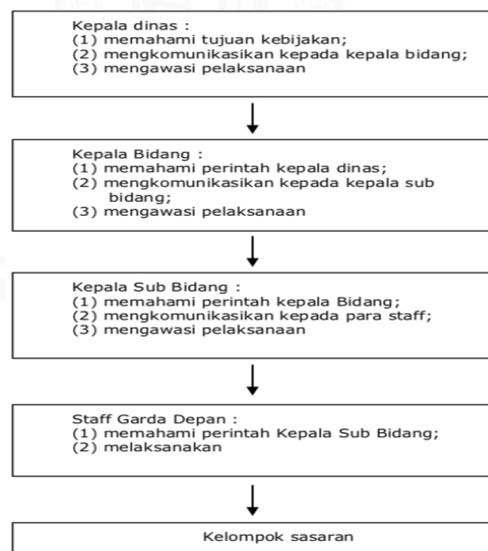
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SIMPPD di Kota Kediri telah diatur prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, prosedur-prosedur dasar kerja atau standar operating prosedur (SOP) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur-prosedur dasar kerja adalah prosedur-prosedur atau standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. dengan adanya prosedur-prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Edward III dalam Winarno (2012) yang mengatakan bahwa dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat di dalam organisasi.

Secara garis besar, tujuan yang diinginkan adalah dapat terwujudnya penggunaan aplikasi SIMPPD untuk mempermudah *stakeholder* dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan. Berdasarkan pemaparan narasumber, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur operasi standar yang berupa pedoman teknis pelaksanaan aplikasi SIMPPD sudah begitu paham dan mengerti standar operasional prosedur (SOP). Dengan begitu dapat

disimpulkan bahwa SOP dalam pelaksanaan kebijakan SIMPPD ini sudah cukup baik dilihat dari aspek SOP. Artinya dengan sudah lengkapnya SOP tentang pelaksanaan SIMPPD di Kota Kediri maka diharapkan tindakan-tindakan dalam organisasi menjadi konsisten.

## 2) Fragmentasi

Edward III dalam Winarno (2006) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diamati bahwa terkait fragmentasi dalam implementasi kebijakan Peraturan Walikota Kediri No.58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) Kota Kediri dapat dikategorikan baik. Struktur Birokrasi, menurut Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012) bahwa struktur birokrasi yang baik pada dasarnya merupakan hierarki implementasi dalam pemerintahan itu yang diwujudkan dalam skema gambar berikut :



**Gambar. 12 Hierarki Implementasi**  
Sumber : Purwanto dan Sulistyastuti, 2012

Dari hasil wawancara peneliti dilapangan dapat diambil kesimpulan bahwa proses struktur birokrasi yang berjalan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Kediri dalam mengimplementasikan kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) sudah dapat dikategorikan baik hal ini dikarenakan proses struktur birokrasi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan teori proses struktur birokrasi yang benar. Peraturan Walikota tersebut diserahkan kepada Kepala Barenlitbang oleh Pemerintah Kota Kediri, kemudian dilimpahkan kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan ditugaskan kepada Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagai administrator, dan staf rendalev sebagai verifikator. Hal lain yang dapat dapat disimpulkan bahwa struktur yang sudah berjalan di Barenlitbang Kota Kediri, tidak berbelit-belit dan tidak rumit dalam proses pelaksanaannya, dan tidak pula menciptakan rantai komando panjang dan kompleks, Sehingga ini sudah berjalan sesuai dengan teori model kebijakan Edward III.

## **2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) pada Pemerintah Kota Kediri**

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Kediri, kemudian

membandingkannya dengan teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III didapatkan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Kediri No.58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD). Melalui faktor pendukung dan penghambat ini dapat menjadi bahan evaluasi Barenlitbang untuk terus melakukan yang terbaik demi berhasilnya implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD). Empat aspek yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi SIMPPD, antara lain :

#### **a. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung implementasi dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD), sebagai berikut:

##### **1) Komunikasi**

Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). George C. Edward III membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan namun juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah Kota Kediri sebagai pembuat kebijakan menyampaikan kebijakannya kepada Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Kediri sebagai pelaksana kebijakan. Kemudian Barenlitbang memberikan sosialisasi atau penyuluhan secara langsung melalui pertemuan-pertemuan, diskusi maupun bimbingan teknis kepada kelompok sasaran.

Kejelasan, kebijakan yang telah ditransmisikan pada para pihak terkait hendaknya diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut. Dari hasil penelitian diketahui bahwa barenlitbang dan kelompok sasaran kebijakan sudah mengerti dan memahami maksud, tujuan dan substansi dari kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Kediri. Sosialisasi yang dilakukan oleh Barenlitbang secara langsung kepada sasaran kebijakan untuk menghindari perbedaan persepsi antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu.

Konsistensi, jika menginginkan proses implementasi menjadi cepat dan efektif maka diperlukan perintah-perintah yang konsisten dan jelas sebab ketidakkonsistenan perintah akan mendorong para pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang sangat longgar dalam mengimplementasikan kebijakan. Dari hasil penelitian dapat diketahui pelaksanaan sosialisasi melalui pertemuan-pertemuan, diskusi, dan bimbingan teknis yang dilakukan barenlitbang secara konsisten menjelaskan kebijakan Perwal Kota Kediri No.58 Tahun 2011 tentang SIMPPD. Pemerintah Kota Kediri juga konsisten dengan perintah yang telah mereka berikan kepada pelaksana kebijakan dengan mengeluarkan Perwal Kota Kediri No.51 tentang Petunjuk Teknis Musyawarah

Perencanaan Pembangunan dengan menggunakan SIMPPD sebagai alat pelaporan yang digunakan oleh barenlitbang dan kelompok sasaran untuk memasukkan hasil musrenbang. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III dimana komunikasi merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan.

## 2) Sumber Daya

Perintah implementasi mungkin akan diteruskan secara jelas dan konsisten namun jika pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan maka implementasipun cenderung kurang efektif. Sumber daya fasilitas, fasilitas merupakan salah satu penunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya peralatan seperti gedung, tanah dan sarana semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Fasilitas yang tersedia di kantor Barenlitbang Kota Kediri sudah cukup memadai dengan adanya perangkat PC atau laptop serta jaringan internet sebagai fasilitas utama dan pendukung dalam mengimplementasikan penggunaan SIMPPD secara *online*.

Sumber Daya Informasi dan Kewenangan, menurut Edward dalam Winarno, sumber daya informasi menjelaskan mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan seperti petunjuk pelaksanaan kebijakan, tahapan, proses atau sejenisnya. Tujuannya agar pelaksanaan kebijakan menjadi lebih jelas. Kewenangan merupakan otoritas atau legimitasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa barenlitbang memiliki pedoman teknis terkait

pengaplikasian SIMPPD yang berisi petunjuk, tahapan dan proses dalam menggunakan SIMPPD. Selain itu, wewenang yang diberikan Pemerintah Kota Kediri kepada Barenlitbang Kota Kediri yaitu sebagai koordinator dan user tertinggi dalam SIMPPD.

Sumber daya anggaran juga cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran akan menghambat pelaksanaan program, terbatasnya anggaran yang tersedia juga akan memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan Perwal Kota Kediri No.58 Tahun 2011 tentang SIMPPD, Pemerintah Kota Kediri memberikan anggaran yang cukup yang berasal dari APBD Kota Kediri. Anggaran tersebut dinilai sudah mencukupi kebutuhan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan implementasi kebijakan yang diberikan. Dengan demikian, sumber daya fasilitas, informasi dan wewenang, serta anggaran telah sesuai dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dimana sumber daya merupakan faktor pendukung dalam sebuah implementasi kebijakan.

### **3) Disposisi**

Menurut Edward III dalam Winarno (2006) kecenderungan dari para pelaksana kebijakkan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Disposisi akan muncul diantara para pelaku kebijakan manakala akan menguntungkan bagi organisasinya dan dirinya pribadi. Proses disposisi ini memerlukan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang kemudian akan timbul

sikap menerima, acuh tak acuh bahkan menolak terhadap kebijakan. Kebijakan yang ditolak oleh pelaksana kebijakan misal organisasi pelaksana kebijakan merasa tidak diuntungkan dengan adanya kebijakan yang ada maka disinilah disposisi menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan. Dari hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa barenlitbang sebagai pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan telah memahami isi substansi dari kebijakan Perwal Kota Kediri No.58 Tahun 2011 Tentang SIMPPD. Sosialisasi yang dilakukan barenlitbang secara langsung sangat efektif, dikarenakan kelompok sasaran dapat bertanya secara langsung apa yang tidak dimengerti. Implementasi SIMPPD akan mempermudah pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran dalam menyusun dokumen perencanaan jangka panjang, menengah maupun rencana kerja instansi, sehingga penggunaan SIMPPD mendapat dukungan baik dari pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran. Hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III.

#### **4) Struktur Birokrasi**

Menurut George C. Edward III ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. SOP menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan bagi setiap implementor. SOP mampu menyeragamkan tindakan-tindakan dari organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terpecah-pecah atau tersebar dapat meningkatkan gagalnya komunikasi. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif. Dari hasil penelitian

dapat diketahui bahwa barenlitbang memiliki pedoman petunjuk teknis yang mengatur prosedur-prosedur dasar pelaksanaan yang diperlukan dalam suatu kebijakan. Pedoman teknis tersebut diharapkan dapat membantu pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SOP sehingga dapat menimbulkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Fragmentasi dalam implementasi kebijakan Perwal No.58 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) telah berjalan dengan baik. Barenlitbang dalam mengimplementasikan kebijakan telah sesuai dengan peran dan tugas yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Kediri.

#### **b. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat implementasi dalam mengimplementasikan kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD), sebagai berikut:

##### **1) Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia, SDM merupakan variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Menurut George C. Edward III, Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Permasalahan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan SIMPPD antara lain:

- a) Ketersediaan jumlah sumber daya manusia di Barenlitbang Kota Kediri belum memadai.

Kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia di Barenlitbang Kota Kediri hanya berjumlah tiga orang, sedangkan jumlah sasaran kebijakan cukup banyak. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya manusia di Barenlitbang yang kurang memadai tidak sesuai dengan teori implementasi kebijakan Edward III.

- b) Kualitas sumber daya manusia di Barenlitbang Kota Kediri yang masih rendah.

Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, dan profesionalitas. Tim pelaksana kebijakan SIMPPD tidak memiliki pengalaman atau keterampilan yang dibutuhkan dalam kebijakan SIMPPD. Hal ini tidak sesuai dengan teori Edward III, dimana kualitas sumber daya manusia harus berkaitan dengan kebijakan yang dilaksanakan.

Latar belakang atau bidang pendidikan dalam sebuah implementasi kebijakan memiliki peranan cukup penting, karena dengan bidang pendidikan yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan akan membuat pelaksanaan kebijakan berjalan lancar. Sedangkan, sumber daya manusia di Barenlitbang hampir tidak memiliki bidang kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SIMPPD.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) sudah berjalan selama hampir tujuh (7) tahun sejak disahkannya pada 28 Desember 2011. Dalam kurun waktu tersebut implementasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) berjalan cukup baik walau masih jauh dari kata sempurna namun tidak dapat dikatakan gagal karena dari empat indikator Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi tidak terjadi masalah yang serius yang mengakibatkan pelaksanaan implementasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) menjadi terhambat atau terhenti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

#### **1. Aspek Komunikasi yang Terjalin Di Dalam Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD)**

Proses komunikasi disini merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan tercapainya tujuan sebuah kebijakan. Proses komunikasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan memiliki tiga (3) indikator, yaitu: Transmisi (Sosialisasi) program kebijakan sudah cukup optimal. Selama ini sosialisasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan

Daerah (SIMPPD) diberikan melalui pertemuan-pertemuan, diskusi dan bimbingan teknis. Kejelasan sosialisasi yang dilakukan oleh Barenlitbang secara langsung kepada sasaran kebijakan untuk menghindari perbedaan persepsi antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Konsistensi perintah dari Pemerintah Kota kepada pelaksana kebijakan tidak berubah-ubah. Pelaksana kebijakan secara konsisten memberikan sosialisasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) setiap awal tahun melalui pertemuan-pertemuan, diskusi dan bimbingan teknis.

## **2. Keberadaan Sumber Daya Dalam Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD)**

Sumber daya manusia yang dimiliki pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) masih kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Terbatasnya sumber daya manusia dapat menjadi penghambat dalam sebuah implementasi kebijakan. Sumber daya informasi dan wewenang yang dimiliki pelaksana kebijakan sudah cukup jelas dengan adanya informasi berupa pedoman teknis tentang tahapan dan proses menjalankan kebijakan tersebut serta wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kediri sebagai koordinator yang mengawasi implementasi kebijakan SIMPPD. Sumber daya fasilitas dan anggaran yang sudah memadai untuk mendukung tercapainya tujuan sebuah kebijakan.

### **3. Disposisi Pelaksana Kebijakan Dalam Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD)**

Disposisi pelaksana memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mengimplementasikan kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD). Barenlitbang sebagai pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan telah memahami isi substansi dari kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD). Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan menerima dan mendukung kebijakan tentang SIMPPD karena dianggap akan menguntungkan bagi pelaksana kebijakan.

### **4. Aspek Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD)**

*Standart Operational Procedure* (SOP) atau Pedoman teknis dalam kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) diharapkan dapat membantu pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SOP sehingga dapat menimbulkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Fragmentasi dalam implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) telah berjalan dengan baik. Barenlitbang dalam mengimplementasikan kebijakan telah sesuai dengan peran dan tugas yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Kediri.

## B. Saran

Dengan melihat hasil penelitian maka peneliti memberikan saran kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri, yaitu:

1. Terbatasnya sumber daya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri dapat menghambat terlaksananya kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPP). Saran untuk Barenlitbang Kota Kediri untuk mengatasi masalah terbatasnya sumber daya manusia, yaitu:

- a. Melakukan pengadaan/rekrutmen tenaga kerja

Pengadaan tenaga kerja/pegawai harus didasarkan berdasarkan uraian pekerjaan (*job description*) dan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan (*job specification*). Fungsi pengadaan tenaga kerja meliputi kegiatan penentuan kebutuhan tenaga kerja (baik mutu dan jumlahnya), mencari sumber tenaga kerja secara efektif dan efisien, mengadakan seleksi, menempatkan tenaga kerja sesuai dengan posisi dan kemampuan tenaga kerja. Barenlitbang perlu menyiapkan atau merekrut personal atau pegawai yang menguasai program dan teknik komputer karena hal ini diperlukan setiap saat bila terjadi kerusakan atau hambatan-hambatan saat menggunakan aplikasi

2. Perlu adanya peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri. Saran

untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu:

- a. Melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang menduduki suatu jabatan tertentu, belum tentu mempunyai kemampuan yang sesuai dengan persyaratan yang diperlukan dalam jabatan tersebut. Hal ini terjadi karena bukan kemampuannya, melainkan tersedianya formasi. Oleh sebab itu, pegawai perlu penambahan kemampuan yang mereka butuhkan.

Perlu adanya pelatihan di bidang teknis dengan jenis diklat yaitu: pelatihan aplikasi Microsoft Windows dan Office, pelatihan program Sistem Informasi Manajemen (SIM), bimbingan teknis operasional. Pengembangan sumber daya manusia selain melalui pelatihan, pengembangan SDM aparatur dapat dilakukan di luar lingkungan kerja dengan mengikutsertakan pada kegiatan tertentu seperti dalam kegiatan forum ilmiah (seminar dan diskusi), lokakarya dan penataran.

- b. Melakukan pelatihan pendidikan bagi teknisi / *programmer* secara berkesinambungan mengikuti perkembangan teknologi dan aplikasi, karena itu penyempurnaan aplikasi harus terus dilaksanakan. .

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Bratakusumah, Deddy dan Riyadh. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John W. 2012. *Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan Mixes (Research Design) Cetakan II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Davis, Gordon B. 2002. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PPM.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faisal, Sanapiah. 2003. *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*. Jakarta :PT RajaGrafindo Persada.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2006. *Dasar-Dasar Teori Administratif Publik. Edisi Pertama*. Malang: Agritek YPN Malang.
- Indrajit, Richardus Eko dkk. 2002. *E-Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi
- \_\_\_\_\_. 2004. *E-Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi
- Jogiyanto HM. 1993. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lembaga Administrasi Negara, 2003, *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*. Jakarta: LAN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.

- Moekijat. 2000. *Kamus Manajemen*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : GP Press Group.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo.
- Rianto, Budi., Tri Lestari. 2012. *Polri & Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik*. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara (PMN).
- Rochaety, Eti, dkk. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Edisi 2*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 1983. *Administrasi Pembangunan Cetakan 10*. Jakarta: Gunung Agung.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutabri, Tata. 2005. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Sutanta, Edhy. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutedjo, D. 2002. *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Taufiq, R. 2013. *Sistem Informasi Manajemen. Konsep Dasar, Analisis dan Metode Pengembangan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Todaro, M.P. 1988. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta : Gelora Aksara Pratama.

\_\_\_\_\_. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1974. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3S.

\_\_\_\_\_. 1984. *Teori & Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.

\_\_\_\_\_. 1987. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.

\_\_\_\_\_. 1988. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta

Wahab, Solichin Abdul. 1990. *Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_. 2002. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

\_\_\_\_\_. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

**Perundang-Undangan :**

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*

Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah

Peraturan Walikota Kediri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Kediri

**Internet**

Pencapaian Kinerja dan Prestasi Pemkot Kediri : Buka Layanan Berbasis Teknologi (<https://www.jawapos.com/radarkediri/read/2017/12/13/33293/buka-layanan-berbasis-teknologi-informasi>), diakses 17 Desember 2017

